



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

2024



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2024 Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan telah memanfaatkan Balanced Scorecard sejak tahun 2013 sebagai alat strategis dalam proses manajemen, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Pendekatan ini memastikan seluruh unit organisasi terhubung secara vertikal maupun horizontal, dengan tujuan akhir mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Balanced Scorecard juga berperan penting dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja. *Balanced Score Card* menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja.

Mengacu pada RPJMN 2021–2024 dan RKP 2023, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan senantiasa mengoptimalkan pelaksanaan seluruh rencana aksi secara efektif dan efisien, dengan berorientasi pada target indikator kinerja yang ditetapkan. Seluruh pencapaian tersebut dirangkum dalam Laporan Kinerja ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2024 ini memuat gambaran pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan sektor perikanan tangkap selama satu tahun. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait dalam memahami pelaksanaan tugas Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Jakarta, 15 Januari 2025

Direktur Kepelabuhanan Perikanan



Tri Aris Wibowo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2024 berdasarkan aplikasi OMSPAN ditetapkan sebesar **Rp127.049.369.000**. Sampai dengan akhir tahun 2024 berdasarkan aplikasi SAKTI, anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sebesar Rp111.585.729.000. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp82.953.466.183 atau telah mencapai **74,34%** (sumber: <https://sakti.kemenkeu.go.id>). Capaian kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan pada Tahun 2024 masuk dalam kategori **Baik**, yang ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU sebesar **109,12%**.

Terkait dengan Indikator Kinerja, saat ini Direktorat Kepelabuhanan Perikanan memiliki 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja di tahun 2024, dengan rincian capaian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	%
1.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan perikanan yang optimal			
	1. Persentase Pelabuhan Perikanan yang Dikembangkan dan ditingkatkan Fasilitasnya (Persen)	6	6,7	111,67
	2. Persentase Pembangunan SKPT (Persen)	85	95	111,76
2.	Pengelolaan Pelabuhan perikanan yang berdaya saing			
	3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	35	35	100
	4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	2	5	250
	5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	28	28,19	100,68
	6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	48	67	139,58
	7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	15	17	113,33

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	%
	8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	40	58	145,00
	9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	78	95	121,79
	10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	77	82,70	107,40
	11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	77	87,00	112,99
3.	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal			
	12. Pelabuhan Pangkalan Yang Menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (Pelabuhan)	296	296	100
	13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	90	127	141,11
	14. Tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai/Skala)	89	96,00	107,87
	15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	100	90	90
	16. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port yang dibiayai Melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	100	70	70
4.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan kepelabuhanan perikanan			
	17. Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan KP (Orang)	422	1328	314,69
5.	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan			

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	%
	18. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	94	97,8	104,04
	19. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	84	91,54	108,98
	20. Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Persen)	94	133,33	141,84
	21. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	80	100	125,00
	22. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	98	74,34	75,86

(Sumber: Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, 2024)

Untuk meningkatkan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU dan Tim Pengelola Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan agar melakukan evaluasi pencapaian yang telah dicapai serta melakukan pemantauan serta pengawalan untuk pencapaian kinerja triwulanan yang akan datang. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan diharapkan dapat mendukung kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang lebih baik lagi pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Sistematika Penyajian Laporan.....	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	5
2.1. Rencana Strategis 2020-2024	5
2.2. Sasaran Kegiatan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	5
2.3. Target Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.....	7
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	9
3.2. Analisis Capaian Kinerja	12
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	64
BAB IV. PENUTUP	66
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Tindak Lanjut Periode Sebelumnya.....	66
4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut	67
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.....	5
Tabel 2. Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja tahun 2024	7
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2024	10
Tabel 4. Capaian IK Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya” Tahun 2024	12
Tabel 5. Capaian IK “Persentase Pembangunan SKPT” Tahun 2024	15
Tabel 6. Capaian IK “Persentase Lokasi pelabuhan yang telah dianalisis terkait kebutuhan Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan”	17
Tabel 7. Capaian IK “Rencana Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan”	20
Tabel 8. Dokumen WKOPP, KKPR, dan KKRL yang diterbitkan pada tahun 2024	20
Tabel 9. Capaian IK “Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum”	21
Tabel 10. Pelabuhan perikanan yang didorong untuk penetapan kelas	22
Tabel 11. Capaian IK “Tingkat pelayanan di Pelabuhan Perikanan (persen)”	25
Tabel 12. Capaian IK “Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat kinerja baik”	27
Tabel 13. Capaian IK “Persentase Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)”	29
Tabel 14. Capaian IK “Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan”	30
Tabel 15. Capaian IK “Tingkat Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA)”	32
Tabel 16. Capaian IK “Tingkat kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)”	33
Tabel 17. Capaian IK “Pelabuhan pangkalan yang menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)”	35
Tabel 18. Capaian IK “Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pascaproduksi”	36
Tabel 19. Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi.....	36
Tabel 20. Capaian IK “Tingkat penerapan PNBP Pascaproduksi di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan”	42
Tabel 21. Capaian IK “Persentase pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan fish market bertaraf internasional yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri”	43
Tabel 22. Capaian IK “Persentase pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan Eco Fishing Port yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri”	48
Tabel 23. Capaian IK “Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kepelabuhanan perikanan”	53
Tabel 24. Capaian IK “Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan”	56
Tabel 25. Rekapitulasi Lembar Kerja Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2024.....	57
Tabel 26. Capaian IK “IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	58
Tabel 27. Capaian IK Persentase unit kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.....	59
Tabel 28. Capaian IK Manajemen Pengetahuan Terstandar Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2024	60

Tabel 29.Capaian IK “Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	60
Tabel 30.Laporan hasil pengawasan Itjen KKP lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	61
Tabel 31.Capaian IK “Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan”	62
Tabel 32. Penyerapan anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan tahun 2024	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.....	3
Gambar 2. Stuktur Organisasi Direktorat Kelabuhanan Perikanan Tahun 2024.	3
Gambar 3. Dashboard Kinerjaku Tahun 2024 Direktorat Kelabuhanan Perikanan.....	9
Gambar 4. IP ASN Direktorat Kelabuhanan Perikanan dan Direktorat lain di DJPT Tahun 2024.....	58

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan infrastruktur yang berbasis pada proses bisnis usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi perikanan. Fokus utamanya adalah menghasilkan outcome berupa pengelolaan perikanan yang efisien serta peningkatan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Pengembangan infrastruktur dilakukan secara sinergis, tidak hanya antar sektor tetapi juga antar wilayah, dengan dukungan peningkatan konektivitas melalui penerapan teknologi informasi berbasis data yang lebih akurat. Secara umum, pengembangan ini bertujuan mendorong terwujudnya sistem infrastruktur pelabuhan perikanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu, dan berdaya saing, termasuk integrasinya dengan sektor terkait seperti industri, jasa, dan transportasi.

Keberadaan pelabuhan perikanan di sentra-sentra usaha perikanan tangkap memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran usaha penangkapan ikan beserta sektor pendukungnya. Oleh karena itu, pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan operasional pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Implementasi pembangunan yang terarah, jelas, terukur, dan akuntabel, serta penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang sesuai dengan pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja suatu instansi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan kinerja ini diharapkan dapat membantu para pemimpin dan jajaran instansi pemerintah dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan program kerja di tahun berikutnya. Dengan demikian, program kerja mendatang dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan, dan akuntabel.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2024 merupakan media informasi yang menyajikan pelaksanaan program, kegiatan, dan pengelolaan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan selama tahun anggaran 2024. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja serta sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi yang diperoleh dirumuskan dalam bentuk kesimpulan yang dapat menjadi masukan penting serta referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan pelabuhan

perikanan di masa mendatang. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

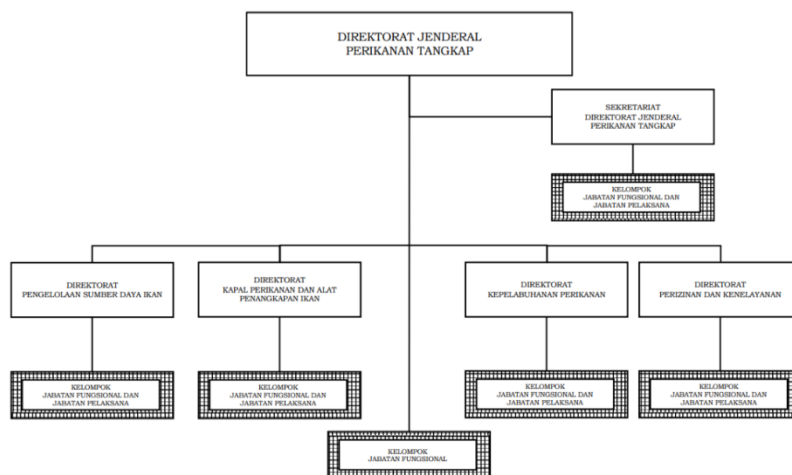
1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan BAB V Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 59, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

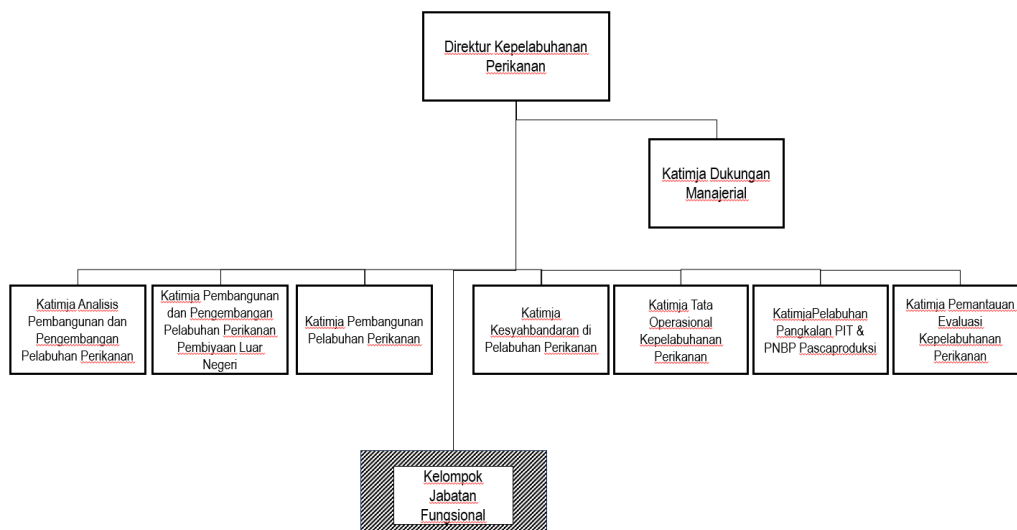
1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan, pengelolaan operasional pelabuhan perikanan dan pelabuhan pangkalan penangkapan ikan terukur, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
2. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan, pengelolaan operasional pelabuhan perikanan dan pelabuhan pangkalan penangkapan ikan terukur, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan, pengelolaan operasional pelabuhan perikanan dan pelabuhan pangkalan penangkapan ikan terukur, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan, pengelolaan operasional pelabuhan perikanan dan pelabuhan pangkalan penangkapan ikan terukur, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; dan
5. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Susunan organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan membentuk 8 (delapan) Tim Kerja yang menggambarkan proses bisnis pelaksanaan tugas dan fungsi mulai dari analisis kebutuhan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan pelabuhan perikanan, pengelolaan Pembangunan pelabuhan perikanan yang berasal dari pinjaman hibah luar negeri, pelaksanaan fungsi perusahaan dan pengoperasian pelabuhan perikanan, pelaksanaan fungsi pemerintahan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, pengelolaan pelabuhan pangkalan penangkapan ikan terukur serta mendukung penarikan PNBP Pasca Produksi, analisis dan evaluasi kinerja pelabuhan perikanan dan unsur dukungan manajerial. Struktur organisasi Tim Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sebagai berikut:



Gambar 2. Stuktur Organisasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

Bab II Perencanaan Kinerja, Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

Bab IV Penutup, pada bagian ini diuraikan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi, tindaklanjut rekomendasi periode sebelumnya, serta rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran, pada bagian ini dilampirkan dokumen perjanjian kinerja, serta dokumen kinerja lainnya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap disusun berdasarkan Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional terkait dengan sektor kelautan dan perikanan dengan rencana strategis sebagai berikut:

1. Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Visi DJPT tahun 2020-2024 adalah “terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri, dan Berkepribadiann Berlandaskan Gotong-Royong”;
2. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
DJPT melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap;
 - b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi subsektor perikanan tangkap;
 - c. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap; dan
 - d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT.

2.2. Sasaran Kegiatan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Sasaran kegiatan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan merupakan bagian dari Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Terdapat 5 Sasaran kegiatan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dengan 22 Indikator Kinerja sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	
1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	1	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)
		2	Persentase Pembangunan SKPT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	
2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing	3	Persentase lokasi Pelabuhan perikanan yang telah dianalisis terkait kebutuhan Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan(persen)
		4	Rencana Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (dokumen)
		5	Persentase Pelabuhan perikanan dengan Tingkat operasional optimum (persen)
		6	Tingkat pelayanan di Pelabuhan Perikanan (persen)
		7	Persentase Pelabuhan perikanan dengan Tingkat kinerja baik (persen)
		8	Persentase pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (persen)
		9	Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (persen)
		10	Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)
		11	Tingkat kinerja penerapan pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (persen)
3	Pemenuhan prasarana pemungutan PNPB perikanan tangkap yang optimal	12	Pelabuhan perikanan yang menerapkan penangkapan ikan terukur (pelabuhan)
		13	Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNPB Pasca Produksi (Pelabuhan)
		14	Tingkat penerapan PNPB Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (nilai/skala)
		15	Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan fish market bertaraf internasional yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri (persen)
		16	Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan Pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep Eco Fishing Port yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri (persen)
4	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kepelabuhanan perikanan	17	Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan KP (orang)
5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	18	Nilai rekonsiliasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (nilai)
		19	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan perikanan (indeks)
		20	Persentase unit kerja Direktorat Kepelabuhanan yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)
		21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	
		22	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)

2.3. Target Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja tahun 2024

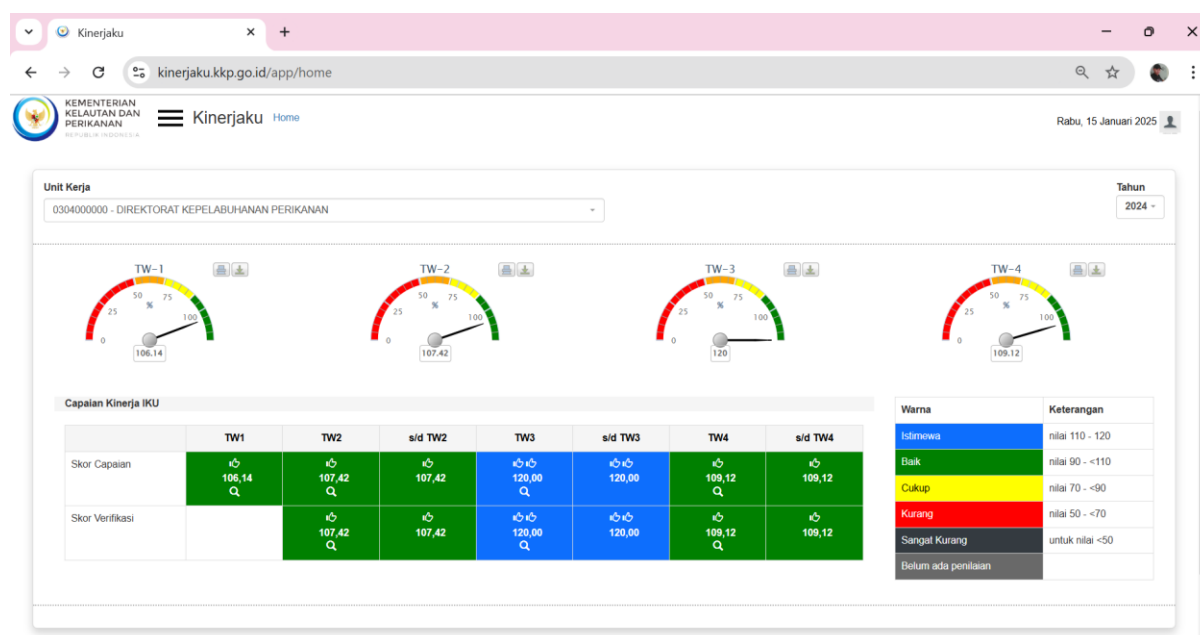
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		WAKTU PENGUKURAN	TARGET
1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	1	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	Triwulan	6
		2	Persentase Pembangunan SKPT	Tahunan	85
2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing	3	Persentase lokasi Pelabuhan perikanan yang telah dianalisis terkait kebutuhan Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan(persen)	Tahunan	35
		4	Rencana Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (dokumen)	Tahunan	2
		5	Persentase Pelabuhan perikanan dengan Tingkat operasional optimum (persen)	Tahunan	28
		6	Tingkat pelayanan di Pelabuhan Perikanan (persen)	Tahunan	48
		7	Persentase Pelabuhan perikanan dengan Tingkat kinerja baik (persen)	Tahunan	15
		8	Persentase pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (persen)	Tahunan	40
		9	Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (persen)	Tahunan	78
		10	Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	Triwulan	77
		11	Tingkat kinerja penerapan pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (persen)	Tahunan	78
3	Pemenuhan prasarana	12	Pelabuhan perikanan yang menerapkan penangkapan ikan terukur (pelabuhan)	Tahunan	296

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		WAKTU PENGUKURAN	TARGET
	pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal	13	Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi (Pelabuhan)	Tahunan	90
		14	Tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (nilai/skala)	Tahunan	89
		15	Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan fish market bertaraf internasional yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri (persen)	Tahunan	100
		16	Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan Pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep Eco Fishing Port yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri (persen)	Tahunan	100
4	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kepelabuhanan perikanan	17	Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan KP (orang)	Tahunan	422
5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	18	Nilai rekonsiliasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (nilai)	Tahunan	94
		19	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan perikanan (indeks)	Semester	84
		20	Persentase unit kerja Direktorat Kepelabuhanan yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	Triwulan	94
		21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)	Triwulan	80
		22	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)	Triwulan	98

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan pada tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Kepelabuhanan Perikanan menitik beratkan pada 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dan 4 (empat) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II dalam bentuk dashboard sebagai berikut:



Gambar 3. Dashboard Kinerjaku Tahun 2024 Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Capaian kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada Tahun 2024 memiliki kategori **“Baik”**, ditandai dengan Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **109,12 %**. Capaian ini merupakan gambaran nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada tahun 2024, dari 22 Indikator Kinerja, hanya 3 Indikator Kinerja yang tidak tercapai, yaitu 1) Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen), 2) IK Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port yang dibiayai Melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen), dan 3) IK Persentase Penyerapan Anggaran. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Capaian	
					2024	%
1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	1	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	6	6,7	111,67
		2	Persentase Pembangunan SKPT (persen)	85	95	111,76
2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing	3	Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	35	48	137,14
		4	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	2	5	250
		5	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	28	28,19	100,68
		6	Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	48	67	139,58
		7	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	15	17	113,33
		8	Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	40	58	145
		9	Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	78	95	121,79
		10	Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	77	82,70	107,40
		11	Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	78	87	112,99%
3	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal	12	Pelabuhan Pangkalan Yang Menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (Pelabuhan)	296	296	100
		13	Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	90	127	141,11

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Capaian	
					2024	%
		14	Tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai/Skala)	89	96,00	107,87
		15	Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	100	90	90
		16	Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port yang dibiayai Melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	100	70	70
4	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan	17	Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan KP (orang)	422	1328	314,69
5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	94	97,8	104,04
		19	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	84	91,54	108,04
		20	Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94	133,33	141,84
		21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)	80	100	125
		22	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)	98	74,34	75,86

3.2. Analis Capaian Kinerja

Pada periode tahun 2024, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan (SK) 1 – Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal

Indikator Kinerja (IK) pada SK 1 yaitu:

- Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya, dan.
- Persentase Pembangunan SKPT.

Indikator Kinerja (IK) 1 – Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya.

Indikator ini menunjukkan persentase pembinaan pengembangan pelabuhan perikanan guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan. Adapun metode perhitungan yang dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan jumlah lokasi capaian pengembangan di Pelabuhan Perikanan berupa salah satu kegiatan:

1. Analisis dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan.
2. Penyiapan dokumen tender/pengadaan pelabuhan perikanan.
3. Pembahasan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan.
4. Pembinaan pembangunan di pelabuhan perikanan.
5. Pengendalian pembangunan di pelabuhan perikanan.
6. Monitoring dan Evaluasi Progres Kegiatan Pembangunan.
7. Supervisi Kegiatan Pembangunan.

Tabel 4. Capaian IK Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya” Tahun 2024

SK 1		Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal							
IK 1		Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)							
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	6	6	6,7	111,67	-	-

Pada tahun 2024, Indikator kinerja Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya telah mencapai 6,7% dari target 6%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelabuhan Perikanan Samudera
 - a. PPS Nizam Zachman Jakarta.
 - b. PPS Cilacap.
 - c. PPS Bitung.
 - d. PPS Belawan.
 - e. PPS Bungus.
 - f. PPS Kendari
2. Pelabuhan Perikanan Nusantara
 - a. PPN Ambon.
 - b. PPN Palabahunratu.
 - c. PPN Kejawanan.
 - d. PPN Ternate.
 - e. PPN Prigi.
 - f. PPN Pemangkat.
 - g. PPN Sibolga.
 - h. PPN Tual.
 - i. PPN Pekalongan.
 - j. PPN Brondong.
 - k. PPN Sungailiat.
 - l. PPN Pengambengan.
 - m. PPN Karangantu.
 - n. PPN Kwandang.
 - o. PPN Tanjung Pandan.
3. Pelabuhan Perikanan Pantai
 - a. PPP Teluk Batang.
 - b. PPP Tegalsari.
4. Pelabuhan Perintis
 - a. PP Lugu Aceh.
 - b. PP Cikidang.
 - c. PP Teluk Awang.
 - d. PP Dagho.
 - e. PP Saumlaki.
 - f. PP Merauke.
 - g. PP Untia.
 - h. PP Natuna.
 - i. PP Sebatik.

5. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu

- a. SKPT Tiakur.
 - b. SKPT le Meulee.
 - c. SKPT Fandoi.
 - d. SKPT Daeo Majiko.
 - e. SKPT Rotendau.
 - f. SKPT Mentawai.
 - g. SKPT Talaud.
 - h. SKPT Sumba Timur.
 - i. SKPT Mimika.
 - j. SKPT Teluk Sinabang.
 - k. SKPT Simeulue.
- Faktor Penentu Keberhasilan dari tercapai IK ini adalah:
 - o Terlaksananya dan terselesainya kegiatan sesuai dengan usulan Pembangunan/rehab fasilitas Pembangunan Pelabuhan Perikanan;
 - o Terlaksananya kegiatan Pembangunan/rehab fasilitas sesuai dengan kontrak yaitu tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya;
 - o Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan fasilitas yang bisa meningkatkan modal dan dapat menambah nilai Pelayanan di Pelabuhan Perikanan.
 - Faktor Penghambat
 - o Hambatan yang biasa terjadi adalah pada kegiatan Pembangunan/rehab Pembangunan adalah faktor cuaca ekstrim, jumlah dan keprofesionalan tenaga kerja dan material. Apabila dari 3 (tiga) ini menyumbang salah satu maka pekerjaan akan terlambat atau bahkan 3 (tiga) faktor ini terjadi maka pekerjaan akan sulit penyedia melakukan mengejar/menyelesaikan hambatan.
 - Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat
 - o Melakukan rapat koordinasi terkait percepatan dengan Menyusun actionplan untuk melalui/melewati hambatan dan keterlambatan.
 - o Action Plan dibuat sedemikian mungkin untuk Menyusun kurva s agar terhindar dari titik kritis penyebab hambatan terjadi
 - o Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan berdasarkan kontrak dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tanpa melakukan penambahan waktu dan penambahan pekerjaan yang menyebabkan volume bertambah dan nilai pekerjaan bertambah (emngantisipasi adanya addendum) untuk pekerjaan 1 tahun berjalan.
 - Kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan/kegagalan
 - o Dilakukan rapat monitoring seminggu sekali untuk mengantisipasi keterlambatan dan kegagalan.

- Semua pekerjaan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik dari pengawas maupun dilakukan dokumentasi pekerjaan ditiap langkah kegiatan dan per progress kegiatan.
- Membuat laporan monitoring dan menyampaikan kendala dilapangan per mingguannya saat dalam rapat mingguan.
- Melaksanakan Pelatihan terkait pengetahuan dibidang konstruksi baik Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan.

Indikator Kinerja (IK) 2 – Persentase Pembangunan SKPT

Merupakan indikator yang menunjukkan persentase progres pembangunan pelabuhan perikanan di SKPT guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan.

Jumlah capaian progress pembangunan pelabuhan perikanan SKPT meliputi:

1. Penyiapan dokumen lelang pembangunan SKPT
2. Penandatanganan kontrak
3. Pembahasan dan koordinasi pelaksanaan konstruksi
4. Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan konstruksi
5. Serah Terima Pekerjaan

Tabel 5. Capaian IK “Persentase Pembangunan SKPT” Tahun 2024

SK 1		Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal							
IK 2		Persentase Pembangunan SKPT (persen)							
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	100	85	95	111,76	-	-

Pada tahun 2024 Indikator Kinerja Persentase Pembangunan SKPT telah mencapai 95% dari target 85%. Hal ini terjadi dengan terselesaikannya di 3 (tiga) lokasi SKPT yang telah terbangun 100% dan sudah melaksanakan serah terima pekerjaan. SKPT tersebut diantaranya SKPT Saumlaki, SKPT Morotai dan SKPT Moa. Pada tahun 2023, target tercapai 100% di 5 (lima) lokasi SKPT dari 4 (empat) Lokasi SKPT yang direncanakan.

- Faktor Penentu Keberhasilan
 - Terlaksananya dan terselesaikannya kegiatan sesuai dengan usulan Pembangunan/rehab fasilitas Pembangunan Pelabuhan Perikanan;
 - Terlaksananya kegiatan Pembangunan/rehab fasilitas sesuai dengan kontrak yaitu tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya;
 - Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan fasilitas yang bisa meningkatkan modal dan dapat menambah nilai Pelayanan di Pelabuhan Perikanan.
 - Koordinasi kepada Pemerintah Daerah/Kementrian Lembaga Terkait

- Faktor Penghambat
 - Hambatan yang biasa terjadi adalah pada kegiatan Pembangunan/rehab Pembangunan adalah faktor cuaca ekstrim, jumlah dan keprofesionalan tenaga kerja dan material. Apabila dari 3 (tiga) ini menyumbang salah satu maka pekerjaan akan terlambat atau bahkan 3 (tiga) faktor ini terjadi maka pekerjaan akan sulit bagi penyedia (kontraktor) untuk mengejar/menyelesaikan hambatan.
 - Pembangunan SKPT ini berlokasi di pulau terluar yang sangat sulit untuk mobilisasi material, tenaga kerja dan peralatan.

- Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat
 - Melakukan rapat koordinasi terkait percepatan dengan Menyusun action plan untuk melalui/melewati hambatan dan keterlambatan.
 - Action Plan dibuat sedemikian mungkin untuk menyusun kurva S agar terhindar dari titik kritis penyebab hambatan terjadi.
 - Untuk material, dilakukan pemesanan sesuai dengan kebutuhan dilapangan
 - Untuk tenaga kerja, dipastikan keprofesionalannya.
 - Peralatan yang digunakan berasal dari peralatan milik Perusahaan atau sewa di pulau terdekat yang bisa menjangkau lokasi pekerjaan.
 - Setiap Lokasi pekerjaan memiliki CCTV sebagai pengawas jarak jauh.
 - Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan berdasarkan kontrak dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tanpa melakukan penambahan waktu dan penambahan pekerjaan yang menyebabkan volume bertambah dan nilai pekerjaan bertambah (mengantisipasi adanya addendum) untuk pekerjaan 1 tahun berjalan.

- Kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan
 - Dilakukan rapat monitoring seminggu sekali untuk mengantisipasi keterlambatan dan kegagalan.
 - Semua pekerjaan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik dari pengawas maupun dilakukan dokumentasi pekerjaan ditiap langkah kegiatan dan per progress kegiatan.
 - Membuat laporan monitoring dan menyampaikan kendala dilapangan per mingguannya saat dalam rapat mingguan.
 - Pelatihan untuk pengelola atau penanggungjawab pelabuhan terkait pengetahuan dibidang konstruksi baik perencanaan, pembangunan dan pengawasan konstruksi.

Sasaran Kegiatan (SK) 2 – Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang berdaya saing

Indikator Kinerja (IK) pada SK 2 yaitu:

- Persentase Lokasi pelabuhan yang telah dianalisis terkait kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan.
- Rencana Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan.
- Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum.
- Tingkat pelayanan di pelabuhan perikanan.
- Persentase pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan PIPP.
- Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
- Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA)
- Tingkat kinerja penerapan pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).

Indikator Kinerja (IK) 3 – Persentase Lokasi pelabuhan yang telah dianalisis terkait kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan.

Indikator ini menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan yang telah dianalisis kebutuhan rencana pembangunan dan/atau pengembangannya. Identifikasi pelabuhan perikanan meliputi:

- a. Analisis kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan perikanan.
- b. Pembahasan dan koordinasi perencanaan jangka panjang dan jangka pendek pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan.

Cara penghitungannya adalah Jumlah pelabuhan perikanan yang telah dianalisis kebutuhan pembangunan dan/atau **(Rppa)** pengembangannya dibandingkan dengan jumlah pelabuhan perikanan berdasarkan Kepmen KP Nomor 132 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (**Rrippn**)

Tabel 6. Capaian IK “Persentase Lokasi pelabuhan yang telah dianalisis terkait kebutuhan Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan”

SK 2		Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing							
IK 3		Persentase Lokasi pelabuhan yang telah dianalisis terkait kebutuhan Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan (persen)							
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	32	35	48	137,14	-	-

Bedasarkan tabel diatas, Capaian Indikator Kinerja Lokasi pelabuhan yang telah dianalisis terkait kebutuhan Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan pada tahun 2024 tercapai 35% sesuai target yang ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui 240 kegiatan Pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan yang tersebar di berbagai pelabuhan perikanan UPT Pusat dan UPT Daerah.

Keberhasilan tercapainya indikator kinerja ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan, sehingga pelaksanaannya dapat terealisasi dengan baik.

Faktor penghambat terkait kebutuhan Pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan Perikanan adalah:

- Keterbatasan Anggaran: Tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk pembiayaan proyek pembangunan dapat menghambat proses pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan.
- Birokrasi yang rumit: Proses perizinan dan regulasi yang kompleks berpotensi untuk memperlambat realisasi pembangunan.
- Kendala Teknis dan Teknologi: Keterbatasan dalam teknologi atau tenaga kerja yang terampil dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan pembangunan.
- Cuaca dan Kondisi Alam: Faktor cuaca ekstrem atau kondisi geografis yang sulit dapat menghambat pekerjaan konstruksi di lapangan.
- Tata Ruang dan Lahan: Persoalan terkait pengadaan lahan atau konflik dengan tata ruang wilayah juga dapat menjadi hambatan, terutama jika melibatkan komunitas lokal atau lingkungan.
- Kurangnya Koordinasi Antara Pihak Terkait: Ketidakefektifan atau kurangnya sinergi antara instansi pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta dapat memperlambat proses pembangunan.
- Keterlambatan Pasokan Material dan Logistik: Masalah dalam distribusi material atau alat konstruksi juga dapat menunda proyek.
- Kendala Sosial dan Lingkungan: Adanya penolakan dari masyarakat lokal atau potensi dampak lingkungan yang belum teratasi dapat menunda atau menghentikan proyek pembangunan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat dalam memenuhi kebutuhan Pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan Perikanan diantaranya adalah :

- Optimalisasi Anggaran: Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran dan melakukan perencanaan keuangan yang lebih matang, termasuk menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui skema pembiayaan publik-swasta (Public Private Partnership/PPP) untuk menambah sumber pendanaan.

- Penyederhanaan Birokrasi: Reformasi birokrasi dengan menyederhanakan proses perizinan dan regulasi akan mempercepat proses persetujuan proyek pembangunan. Penerapan sistem digital untuk perizinan juga dapat mempermudah dan mempercepat proses administrasi.
- Peningkatan Kapasitas Teknis dan Teknologi: Pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja konstruksi perlu ditingkatkan agar mereka memiliki keterampilan yang memadai. Selain itu, adopsi teknologi terbaru dalam bidang konstruksi dapat mempercepat proses pembangunan.
- Mitigasi Dampak Cuaca dan Alam: Perencanaan pembangunan yang matang, termasuk penyusunan jadwal yang fleksibel, harus mempertimbangkan kondisi cuaca dan alam. Penggunaan teknologi konstruksi yang sesuai untuk wilayah tertentu juga dapat membantu mengatasi hambatan alam.
- Perencanaan Tata Ruang yang Matang: Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan perencanaan tata ruang dengan kebutuhan pembangunan. Penyelesaian masalah pembebasan lahan melalui dialog dengan masyarakat dan ganti rugi yang adil juga perlu diperhatikan.
- Peningkatan Koordinasi Antarlembaga: Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta melalui forum koordinasi rutin. Penguatan kelembagaan dan pengawasan pelaksanaan proyek juga sangat penting.
- Penguatan Manajemen Logistik dan Rantai Pasok: Untuk mengatasi keterlambatan material, perlu dilakukan perencanaan rantai pasok yang baik dengan melibatkan pemasok lokal dan regional. Penyediaan material secara tepat waktu dan optimalisasi distribusi akan memperlancar pembangunan.
- Penyelesaian Masalah Sosial dan Lingkungan: Dialog terbuka dengan masyarakat lokal perlu dilakukan untuk mengatasi potensi konflik. Selain itu, pelaksanaan studi lingkungan yang komprehensif dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat membantu memitigasi dampak lingkungan yang timbul dari pembangunan.

Kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja Pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan Perikanan diantaranya adalah :

- Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis peningkatan keahlian bagi pengelola Pelabuhan perikanan.
- Anggaran yang tersedia dan tepat sasaran.

Indikator Kinerja (IK) 4 – Rencana Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan.

Indikator ini menunjukkan tersedianya dokumen rencana dan konsep pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan. Jumlah dokumen perencanaan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan meliputi dokumen rencana Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan diantaranya studi kelayakan, dokumen lingkungan, KKRL, WKOPP, masterplan dan DED.

Tabel 7. Capaian IK “Rencana Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan”

SK 2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing								
IK 4	Rencana Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (dokumen)								
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	2	2	6	300	-	-

Pada tahun 2024, indikator kinerja Rencana Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan tercapai 6 dari target 2 dokumen. 5 dokumen ini terdiri 3 Kepmen Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP), 1 dokumen Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan 1 dokumen Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) yang telah diterbitkan pada tahun 2024, sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 8. Dokumen WKOPP, KKPRL, dan KKRL yang diterbitkan pada tahun 2024

Dokumen WKOPP	
1.	Kepmen KP. Nomor 8 tahun 2024 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke;
2.	Kepmen KP. Nomor 72 tahun 2024 tentang tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pangkalan Pendaratan Ikan Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
3.	Kepmen KP. Nomor 66 tahun 2024 tentang tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
Dokumen KKPRL	
1.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut No. B.1327/MEN-KP/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 lokasi PPN Brondong Provinsi Jawa Timur.
Dokumen KKRL	
1.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha, No. 570/001/61.11.3/KKKPR/DPMPTSP/2024 tanggal 11 Oktober 2024 lokasi Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang.

Faktor keberhasilan dari capaian ini adalah:

1. Persyaratan administrasi penyusunan dokumen tersebut terpenuhi sesuai dengan PP Nomor 27 tahun 2021 pasal 217 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;

2. Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya penyusunan dan persetujuan surat rekomendasi WKOPP sesuai dengan pemangku kebijakan;
3. Terbitnya Kepmen WKOPP melalui proses dan rekomendasi Biro Hukum.

Sedangkan faktor penghambat dalam penyusunan dokumen ini diantaranya:

1. Kelengkapan administrasi dalam penyusunan WKOPP belum terpenuhi;
2. Kurangnya pemahaman pemerintah daerah dalam kontribusi WKOPP terhadap keberadaan pelabuhan perikanan di daerah kewenangannya, sehingga pemerintah daerah sulit mengeluarkan rekomendasi dukungan penyusunan WKOPP;
3. Proses penerbitan Kepmen WKOPP membutuhkan waktu yang lama;

Kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan capaian ini diantaranya:

1. Sosialisasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Pemerintah Daerah terkait pentingnya WKOPP di pelabuhan perikanan ;
2. Mengadakan Bimtek WKOPP kepada pengelola atau pelaksana di pelabuhan perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 5 – Persentase pelabuhan dengan tingkat operasional optimum

Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum dihitung berdasarkan capaian tingkat operasional pelabuhan perikanan dibandingkan dengan jumlah pelabuhan perikanan yang tercantum dalam RIPPN. Pelabuhan Perikanan dengan tingkat operasional optimum dilihat dari beberapa aspek meliputi:

- a. Fasilitas minimal pelabuhan perikanan.
- b. Kriteria teknis.
- c. Kriteria operasional.
- d. Kelembagaan.
- e. Sumber Daya Manusia.
- f. Anggaran Operasional.

Tabel 9. Capaian IK “Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum”

SK 2									
Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing									
IK 5									
Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum (Persen)									
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	26	28	28,19	100,68	-	-

Pada tahun 2024, Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum hingga tahun 2024 telah memenuhi target IKU yaitu **28,19% dari target 28%**. Jumlah pelabuhan perikanan yang telah mencapai tingkat operasional optimum hingga tahun 2023

sebanyak 117 dan tahun 2024 meningkat sebanyak **11 pelabuhan perikanan** dari total keseluruhan pelabuhan perikanan dalam RIPPN sebanyak 454 (tidak termasuk calon pelabuhan/CP) yang selanjutnya akan didorong untuk penetapan kelasnya, sebagai berikut:

Tabel 10. Pelabuhan perikanan yang didorong untuk penetapan kelas

No	Provinsi	Pelabuhan Perikanan	Kab./Kota	Optimum pada Kelas Pelabuhan Perikanan
1	Jawa Timur	Grajagan	Kab. Banyuwangi	Pelabuhan Perikanan Pantai
2	Jawa Timur	Pancer	Kab. Banyuwangi	Pangkalan Pendaratan Ikan
3	Jawa Timur	Tambakrejo	Kab. Blitar	Pangkalan Pendaratan Ikan
4	Jawa Timur	Popoh	Kab. Tulungagung	Pangkalan Pendaratan Ikan
5	Jawa Timur	Campurejo	Kab. Gresik	Pangkalan Pendaratan Ikan
6	Jawa Timur	Banyusangkan	Kab. Bangkalan	Pangkalan Pendaratan Ikan
7	Jawa Timur	Camplong	Kab. Sampang	Pangkalan Pendaratan Ikan
8	Jawa Timur	Branta Pesisir	Kab. Pamekasan	Pangkalan Pendaratan Ikan
9	Jawa Timur	Ngemplakrejo	Kota Pasuruan	Pangkalan Pendaratan Ikan
10	Kalimantan Barat	Selakau	Kab. Sambas	Pangkalan Pendaratan Ikan
11	Kalimantan Barat	Sungai Bangun	Kab. Ketapang	Pangkalan Pendaratan Ikan

Kegiatan pendukung lain yang telah dilaksanakan oleh Tim Kerja TOPP dalam rangka mendorong pelabuhan perikanan mencapai tingkat operasional optimum antara lain:

- a. Mendukung pemenuhan kebutuhan BBM untuk nelayan melalui:
 - 1) penerbitan nomor pendaftaran calon pembangun dan pengelola SPBUN sebanyak **56 lokasi**;
 - 2) koordinasi secara kontinyu dengan BPH Migas, PT. Pertamina Patra Niaga dan DKP Provinsi seluruh Indonesia dalam mengawal kebutuhan dan penyaluran BBM Subsidi dimana Kuota JBT jenis minyak solar untuk konsumen pengguna usaha

- perikanan tahun 2024 sebesar 2.242.368 KL. Total Kuota di SPBUN sebanyak 721.863 KL, sisanya sebesar 1.520.505 KL berada di penyalur SPBU; dan
- 3) menyampaikan usulan kebutuhan kuota JBT jenis minyak solar untuk konsumen pengguna usaha perikanan tahun 2025 kepada BPH Migas sebesar **5.113.632,98 KL JBT minyak solar** dan **95.670,79 KL JBKP Peralite**.
- b. Peningkatan kelas 3 (tiga) pelabuhan perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KEPMEN KP) yaitu:
- 1) KEPMEN KP Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah Menjadi **Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasik Agung**, Tanggal 02 Agustus 2024;
 - 2) KEPMEN KP Nomor 73 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah menjadi **Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari**, Tanggal 07 Oktober 2024; dan
 - 3) KEPMEN KP Nomor 79 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kelas Pangkalan Pendaratan Ikan Larangan, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah menjadi **Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan**, Tanggal 05 November 2023
- c. Pengawasan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan meliputi:
- 1) **Pengembangan SELARASKAN versi 2** untuk optimalisasi pelaksanaan pengendalian lingkungan dengan penyempurnaan program mandatory dan voluntary dengan penambahan indikator dan frekuensi pelaksanaan serta penginputan data dukung menggunakan *mobile phone*;
 - 2) Sosialisasi dan implementasi SELARASKAN kepada seluruh pelabuhan perikanan, dimana jumlah pelabuhan perikanan yang **sudah terdaftar dalam SELARASKAN sebanyak 74 pelabuhan perikanan** terdiri atas 22 PP UPT Pusat, 4 PP Perintis dan 48 PP UPTD;
 - 3) Evaluasi pelaksanaan pengendalian lingkungan di 22 Pelabuhan Perikanan UPT Pusat melalui verifikasi penilaian SELARASKAN setiap bulan dan disampaikan kepada masing-masing PP UPT Pusat setiap triwulan;
 - 4) Memberikan fasilitasi keikutsertaan pelabuhan perikanan dalam penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan dan Bandar Udara Sehat (PBUS) tahun 2024 oleh Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan pelabuhan dan bandar udara penerima penganugerahan Tanda Penghargaan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat Tahun 2024 melalui Keputusan Nomor HK.01.07/MENKES/1817/2024. **Pelabuhan Perikanan yang berhasil menerima penganugerahan sebanyak 8 (delapan)** yaitu PPS Nizam Zachman, PPS Cilacap, PPS Bungus, PPN Prigi, PPN Kejawan, PPN Ternate, PPN Kwardang dan PPN Karangantu.

- d. Pelaksanaan pembinaan Cara Penanganan Ikan yang Baik melalui beberapa kegiatan antara lain:
- 1) Penyiapan SDM pembina CPIB melalui kegiatan pelatihan dan uji kompetensi bagi petugas pembina CPIB di pelabuhan perikanan. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan 2 (dua) kali pelatihan yaitu pada tanggal 07-12 Juli 2024 sebanyak 35 peserta dan pada tanggal 27 Oktober - 01 November 2024 sebanyak 36 peserta. Total keseluruhan **petugas pembina CPIB hingga tahun 2024 sebanyak 123 orang yang tersebar di 48 pelabuhan perikanan** (22 PP UPT Pusat, 22 PP UPTD dan 4 PP Perintis);
 - 2) Sosialisasi dan rapat koordinasi dengan seluruh pelabuhan perikanan dalam pelaksanaan pembinaan CPIB pasca terbitnya Permen KP Nomor 8 Tahun 2024 dan Permen KP Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - 3) Menyusun modelling pelaksanaan pembinaan CPIB dalam rangka Sertifikasi CPIB bersama BP2MHKP di 3 (tiga) pelabuhan perikanan yaitu PPS Nizam Zachman, PPS Bitung dan PPN Pengambengan (Benoa); dan
 - 4) Pelaksanaan **Bimbingan Teknis CPIB kepada nelayan di 17 lokasi dengan jumlah total nelayan sebanyak 1.700 orang.**
- e. Penyiapan operasionalisasi dan peresmian Pelabuhan Perikanan Ukurlaran (SKPT Saumlaki) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 05 September 2024. Penyiapan operasionalisasi meliputi pencatatan dan PSP aset, penyusunan profil dan promosi investasi bisnis, pelatihan SDM dll.

Indikator Kinerja (IK) 6 – Tingkat pelayanan di pelabuhan perikanan

Tingkat pelayanan di Pelabuhan Perikanan merupakan tingkat pelayanan perusahaan pelabuhan perikanan yang dilaksanakan terhadap UPT Pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Perikanan Peritis yang terdiri dari:

- a. Tingkat kualitas waktu pelayanan penerbitan surat balasan terhadap rekomendasi penggunaan tanah dan/atau bangunan di Pelabuhan Perikanan.
- b. Tingkat kepatuhan penggunaan tanah dan/atau bangunan di Pelabuhan Perikanan;
- c. Tingkat pelayanan yang terstandarkan.

Tabel 11. Capaian IK “Tingkat pelayanan di Pelabuhan Perikanan (persen)”

SK 2		Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing								
IK 6		Tingkat pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)								
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT		
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	44,75	48	67	139,58	-	-	

Tingkat pelayanan di pelabuhan perikanan hingga tahun 2024 telah memenuhi target IKU yaitu **67% dari target 48%**. Nilai tersebut didapatkan dari perhitungan persentase manual IKU pada pelayanan permohonan penggunaan atau pemanfaatan fasilitas di pelabuhan perikanan yang terdiri dari:

- a. Tingkat kualitas waktu penerbitan izin prinsip sebesar 22% dari bobot total dimana surat yang diproses atau terbit kurang dari 7 hari sebanyak 19 surat dari total 34 surat permohonan;
- b. Tingkat kepatuhan pengguna jasa sebesar 25% dari bobot total dimana jumlah pengguna jasa tanah dan atau bangunan yang patuh merupakan permohonan yang terbit persetujuan prinsip atau diteruskan untuk diproses oleh sekretariat DJPT sebanyak 21 surat permohonan dari total 34 surat permohonan;
- c. Tingkat pelayanan yang terstandarkan menggunakan SOP sebesar 20% dimana telah dilakukan pengesahan terhadap 2 (dua) SOP pelayanan yang dilakukan di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yaitu:
 - 1) Nomor SOP: B.417/DJPT.4/OT.310/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan nama SOP Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah Berukuran $\geq 100 \text{ m}^2$ s.d 2.000 m^2 dan/atau Bangunan $\geq 100 \text{ m}^2$ s.d 200 m^2 ; dan
 - 2) Nomor SOP: B.434/DJPT.4/OT.310/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan nama SOP Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah Berukuran $\geq 2.000 \text{ m}^2$ dan/atau Bangunan $\geq 200 \text{ m}^2$.

Kegiatan pendukung lain yang telah dilaksanakan oleh Tim Kerja TOPP dalam rangka mendorong optimalisasi pelaksanaan pelayanan dan pengusaha pelabuhan perikanan antara lain:

- a. Berdasarkan surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan Nomor B.1467/DJPT.4/TU.330/IV/2024 tanggal 24 April 2024, telah dilaksanakan evaluasi pengusaha berupa penggunaan tanah dan/atau bangunan di Pelabuhan Perikanan Triwulan I pada tanggal 2 - 3 Mei 2024 terhadap seluruh UPT Pusat Pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Perikanan Perintis;

- b. **Penerbitan surat persetujuan prinsip penggunaan tanah dan/atau bangunan hingga 1 September 2024 sebanyak 14 surat** dimana berdasarkan surat Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Nomor B.3521/DJPT.1/HK.410/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 perihal Pemberitahuan/Surat Edaran terkait penerapan PP 28/2020 tentang perubahan atas PP 27/2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mulai bulan September tata cara permohonan sewa menggunakan mekanisme pemanfaatan BMN;
- c. Merumuskan kebijakan dalam rangka penanganan kapal mangkrak di pelabuhan perikanan melalui **Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 45 tahun 2024** tentang Petunjuk Teknis Penanganan Kapal Tidak Beroperasi di Pelabuhan Perikanan yang Dibangun dan/atau Dioperasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 12 Desember 2024
- d. Optimalisasi tarif PNBP non SDA melalui **usulan revisi PP Nomor 85 tahun 2021** tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi:
- 1) menaikkan beberapa tarif pelayanan antara lain:
 - Pelayanan Tambat dan/atau Labuh Kapal Non perikanan; dan
 - Pelayanan Wisata Bahari.
 - 2) menambah tarif pelayanan baru meliputi:
 - Jasa penggunaan instalasi Penyediaan Air Laut Bersih
 - Tempat Pelayanan Dock
 - Penggunaan Guest House
 - Pelayanan Perizinan Berusaha Aktivitas Pelabuhan Perikanan; dan
 - Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).
- e. Mendorong optimalisasi capaian PNBP non SDA di PP UPT Pusat. Capaian PNBP non SDA tahun 2024 sebesar Rp90.829.347.959,00 dari target yang ditetapkan sebesar 61.789.798.000,00 sehingga **capaian PNBP non SDA tahun 2024 melebihi target yaitu sebesar 147%**.
- f. Pengembangan sistem monitoring pelayanan operasional kapal tambat labuh pada **aplikasi SIJAKA** meliputi:
- 1) peningkatan integrasi dengan sistem TemanSPB untuk faktor pengurang pembebasan SPB;
 - 2) perbaikan menu pelaporan pendapatan PNBP di Pelabuhan;
 - 3) modul input jenis PNBP jasa kepelabuhan lainnya secara berkala;
 - 4) pengembangan dashboard capaian PNBP jasa kepelabuhan;
 - 5) peningkatan modul verifikasi perhitungan jasa tambat labuh yang memiliki lebih dari 1 faktor penambah atau pengurang;

- 6) penyediaan prototipe sistem monitoring kapal di kolam pelabuhan yang terpasang diatas kapal dan penerima di kantor pelabuhan perikanan; dan
 - 7) melakukan instalasi dan pemasang perangkat.
- g. Menyusun usulan revisi PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko khususnya pada KBLI 52224 yaitu aktivitas pelabuhan perikanan untuk mengoptimalisasi pelaksanaan kegiatan usaha di pelabuhan perikanan;
- h. Merumuskan kebijakan Konsesi di Bidang Kepelabuhanan Perikanan. Telah disampaikan memorandum dari Direktur Kepelabuhanan Perikanan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2797/DJPT.4/TU.140/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal penyampaian laporan perkembangan pembahasan mekanisme konsesi di bidang kepelabuhanan perikanan. Pelabuhan perikanan yang akan dikonsesikan harus tercantum pada Keputusan Menteri tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN). Kondisi pelabuhan yang akan dikonsesikan meliputi:
- 1) titik rencana lokasi pelabuhan perikanan (belum terdapat lahan/tanah);
 - 2) titik lokasi pelabuhan perikanan yang masih berupa lahan/tanah;
 - 3) pelabuhan perikanan yang telah terbangun dan dilengkapi dengan fasilitasfasilitasnya; atau
 - 4) pelabuhan perikanan yang telah terbangun sebagian dan masih diperlukan pembangunan fasilitas.

Indikator Kinerja (IK) 7 – Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat kinerja baik

Indikator ini menunjukkan menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan dengan Tingkat kinerja minimal baik berdasarkan aplikasi PIPP. Pengukuran indikator ini dilakukan dalam waktu tahunan dengan target indikator adalah 15 %.

Tabel 12. Capaian IK “Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat kinerja baik”

SK 2		Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing								
IK 7		Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat kinerja baik								
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT		
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	15	15	17	113,33	-	-	

Pada tahun 2024, IK Persentase pelabuhan dengan tingkat kinerja baik tercapai 17%, dengan persentase terhadap target sebesar 113,33%. Pemantauan dan Evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan merupakan bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja dari

pelabuhan perikanan yang terbukti secara konkret dapat diukur dan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perikanan maka secara berkala perlu dilakukan evaluasi tingkat operasional pelabuhan. Selain itu, pembangunan dan pembinaan pelabuhan perikanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah juga membutuhkan informasi mengenai kinerja dari pengelolaan pelabuhan perikanan yang digunakan sebagai bahan rekomendasi dalam penentuan kebijakan pengelolaan pelabuhan perikanan.

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sebagai pembina teknis operasional pelabuhan perikanan telah membuat dan terus memperbaharui Pedoman Evaluasi Kinerja operasional Pelabuhan Perikanan dengan standar kriteria untuk menilai tingkat operasional pelabuhan perikanan dalam rangka pelaporan operasional pelabuhan perikanan melalui sistem informasi kepelabuhanan perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Faktor penunjang tercapainya target indikator Presentase Pelabuhan dengan Tingkat Kinerja minimal Baik adalah:

- 1) Keaktifan petugas pelabuhan perikanan untuk menginputkan data-data yang diperlukan kedalam Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan yang merupakan sistem informasi kepelabuhanan perikanan;
- 2) Peningkatan pelayanan petugas seperti untuk kegiatan pendataan produksi ikan hasil tangkapan, penerbitan persetujuan berlayar, dan pelaporan kedatangan kapal di pelabuhan perikanan;
- 3) Pemanfaatan sistem informasi TemanSPB, elogbook, dan lain-lain untuk operasional dan pelayanan pelabuhan perikanan; dan
- 4) Penyediaan dan perbaikan fasilitas pokok, penunjang, fungsional pelabuhan untuk menunjang pelayanan pelaksanaan tugas serta fungsi pelabuhan perikanan.

Sementara itu beberapa faktor yang dapat menjadi kendala pencapaian target indikator Presentase Pelabuhan dengan Tingkat Kinerja minimal Baik adalah:

- 1) Tidak tersedianya SDM di pelabuhan perikanan;
- 2) Kurangnya anggaran untuk operasional dan pembangunan/perbaikan fasilitas pelabuhan perikanan;
- 3) Rendahnya kompetensi petugas pelabuhan perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 8 – Persentase pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)

Indikator ini menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan yang melakukan input data produksi kedalam aplikasi data PIPP. Cara menghitungnya adalah pelabuhan perikanan non calon pelabuhan perikanan (40% dari RIPP No. 132/2023) sebanyak 450 lokasi.

Tabel 13. Capaian IK “Persentase Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)”

SK 2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing									
IK 8	Persentase pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)									
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT		
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	36,06	40	58	145	-	-	

IK Persentase Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) pada tahun 2024 tercapai 58% dari target 40%, dengan persentase realisasi sebesar 145%.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, telah mengatur agar lembaga pengelola pelabuhan perikanan harus menyampaikan laporan kegiatan pelabuhan perikanan setiap bulan kepada Menteri dan Gubernur sesuai kewenangannya. Laporan kegiatan pelabuhan perikanan berisikan antara lain kegiatan operasional pelabuhan perikanan, seperti frekuensi dan jumlah kapal serta produksi dan nilai produksi. Laporan kegiatan operasional pelabuhan perikanan tersebut juga digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja terhadap kelas pelabuhan perikanan dan penyusunan kebijakan pengelolaan pelabuhan perikanan.

Hal tersebut tentunya memerlukan suatu *tools* berupa sistem informasi untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisa serta menyajikan data dan informasi dari berbagai kegiatan tersebut untuk pengambilan kebijakan pengelolaan pelabuhan perikanan yang lebih baik. Untuk itu Direktorat Kepelabuhanan Perikanan telah membangun suatu sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan.

Memperhatikan pentingnya peranan PIPP maka sudah seharusnya semua pelabuhan perikanan menerapkan PIPP dalam pelaksanaan operasional pelabuhan perikanan. Berdasarkan data Rencana Induk Pelabuhan Perikanan terdapat sebanyak 450 pelabuhan dengan status Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dan Pelabuhan Perikanan (PP).

Beberapa faktor yang menunjang pencapaian indikator Persentase Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan adalah:

- 1) Peran serta pemerintah daerah untuk turut menggunakan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan pada Unit Pelaksana Teknis pelabuhan perikanan yang menjadi tanggungjawabnya;
- 2) Penempatan enumerator pendataan dari Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur;

- 3) Pengembangan dan pengintegrasian Sistem Informasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan untuk lebih memudahkan dalam penggunaannya dan meningkatkan pemanfaatannya oleh para pengguna; dan
- 4) Penyelenggaraan bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi petugas PIPP.

Sementara itu beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian target indikator Persentase Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan adalah:

- 1) Masih terdapat pemerintah daerah yang belum menggunakan PIPP;
- 2) Kurangnya SDM dan anggaran untuk operasional pelabuhan perikanan khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja (IK) 9 – Tingkat kinerja kesyahbandaran di pelabuhan perikanan

Indikator kinerja tingkat kinerja kesyahbandaran pelabuhan perikanan dihitung berdasarkan dua komponen, yaitu peningkatan kapasitas SDM Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dengan bobot penilaian 40%, dan peningkatan jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan kesyahbandaran dengan bobot penilaian 60%.

Tabel 14. Capaian IK “Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan”

SK 2		Pengelolaan perikanan yang berdaya saing							
IK 9		Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan							
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	77	78	95	121,79	-	-

Pada tahun 2024, IK Tingkat kinerja kesyahbandaran di pelabuhan perikanan telah tercapai 95% dari target 78, dengan persentase realisasi terhadap target sebesar 121,79%.

Beberapa hal yang telah dilakukan guna mencapai target Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yaitu:

1. Penugasan dan Penempatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebanyak 169 orang yang disebar di 276 Pelabuhan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor:
 - a) 21 tahun 2024 tentang Penempatan dan Penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
 - b) 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 21 Tahun 2024 tentang Penempatan dan Penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

- c) 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 21 Tahun 2024 tentang Penempatan dan Penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
 - d) 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Penempatan dan Penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
2. Sebanyak 177 Pelabuhan telah menerapkan aplikasi TemanSPB dengan jumlah Persetujuan Berlayar yang diterbitkan periode Tahun 2024 tercatat sebanyak 177586 dokumen dan jumlah STBLKK yang diterbitkan sebanyak 184340 dokumen.
 3. Guna menyamakan persepsi Syahbandar dan meningkatkan jiwa korsa telah dilaksanakan Rapat Teknis Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada tanggal 17-21 September 2024 di Aula Pertemuan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, Cirebon, Jawa Barat yang dihadiri seluruh Syahbandar baik secara luring maupun daring.
 4. Pemenuhan SDM Kesyahbandaran melalui pelaksanaan Diklat:
 - 1) Diklat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan Uji Kompetensinya dengan peserta sebanyak 30 orang dengan bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan.
 - 2) Pelatihan Dasar Kesyahbandaran bagi Petugas Kesyahbandaran sebanyak 65 orang dengan bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan.
 5. Berdasarkan hal tersebut di atas, capaian tingkat Kinerja Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan periode Tahun 2024 mencapai 95% dari target IKU 78%.
 6. Beberapa upaya yang akan dilakukan guna peningkatan pelayanan Kesyahbandaran di Tahun 2025, diantaranya:
 - 1) Peningkatan kapasitas SDM Kesyahbandaran melalui pelaksanaan Diklat Syahbandar dan Pelatihan Dasar Kesyahbandaran bagi Petugas kesyahbandaran.
 - 2) Peningkatan Kompetensi Syahbandar melalui pelaksanaan pelatihan sertifikasi berupa radio, pemadam kebakaran, pencarian dan penyelamatan dan kompetensi lainnya.
 - 3) Percepatan reviu Peraturan Menteri KP No. 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 10 – Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme *Port State Measures Agreement* (PSMA)

Indikator kinerja Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilalui melalui mekanisme *Port State Measures Agreement* (PSMA) adalah Tingkat kinerja pelayanan kapal berbendera asing yang di layani melalui mekanisme PSMA dan dihitung berdasarkan dua komponen, yaitu:

- Jumlah SDM yang memahami penerapan PSMA, dengan bobot penilaian 30%.
- Survey kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan AREP, dengan bobot penilaian 70%.

Tabel 15. *Capaian IK “Tingkat Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA)”*

SK 2 Pengelolaan perikanan yang berdaya saing									
IK 10 Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme <i>Port State Measures Agreement</i> (PSMA)									
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	76	77	82,70	107,40	-	-

Beberapa capaian dan kegiatan yang telah dilakukan pada periode Januari – Desember 2024, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Telah terbit 81 Notifikasi Penerimaan Kapal Asing Masuk ke Pelabuhan kepada 39 Kapal Perikanan Berbendera Jepang, 1 Kapal Perikanan Berbendera Rusia dan 1 Kapal Reeveer Cargo berbendera Korea Selatan. Tujuan kapal – kapal berbendera Jepang dan Rusia tersebut masuk ke Pelabuhan yang telah ditetapkan adalah pergantian crew, pengisian perbekalan dan BBM sementara kapal berbendera Korea tersebut untuk melakukan pembongkaran ikan dalam rangka supply bahan baku bagi Unit Pengalihan Ikan PT. Aneka Tuna Indonesia. Hasil pemeriksaan PSM ke-81 kapal perikanan berbendera asing tersebut telah dilaporkan dan disampaikan kepada PSMA Sekretariat - *Food and Agriculture Organization* (FAO), negara bendera dan organisasi perikanan regional terkait.
- Menghadiri pertemuan *Second Meeting of The PSMA Strategy ad hoc Working Group dan Fifth Meeting of the Part 6 Working Group* di Busan, Korea Selatan, pada tanggal 21-25 Oktober 2024.
- Peningkatan kapasitas SDM Inspector PSMA:
 - 2 orang telah mengikuti *FAO International Training Course on PSMA Inspections* di *Busan* pada tanggal 21 Oktober s.d 8 November 2024; dan

- 2) 2 orang telah mengikuti *Regional Training Course on Enhancing Capacity for MCS of Domestic and International Fishing Vessel to Combat IUU Fishing*, pada tanggal 19 - 22 November 2024 di *Samut Prakan, Thailand*.
- d. Pelaksanaan *Workshop PSMA on Global Information Exchange System* pada tanggal 12 – 17 Desember 2024 dengan pendanaan dari FAO.
- e. Berdasarkan hal tersebut di atas diperoleh tingkat kinerja pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme dengan capaian 82,70% dari target IKU 77%.
- f. Beberapa upaya yang akan dilakukan guna peningkatan penerapan PSMA pada Tahun 2025, diantaranya:
 - 1) Melakukan reviu terhadap Pelabuhan Tempat Pelaksanaan PSMA.
 - 2) Peningkatan kapasitas Petugas Inspektur PSM.
 - 3) Penyusunan MOU antara Ditjen Perikanan Tangkap dengan Ditjen Perhubungan laut terkait dengan pelaksanaan PSMA.

Indikator Kinerja (IK) 11 – Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Indikator Tingkat kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dihitung berdasarkan:

- a. Peningkatan kapasitas SDM petugas SHTI yang ditetapkan, dengan bobot penilaian 30%.
- b. Peningkatan jumlah SDM Operator LA, dengan bobot penilaian 50%.
- c. Jumlah verifikasi SHTI dari negara importir, dengan bobot penilaian 20%.

Tabel 16. Capaian IK “Tingkat kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)”

SK 2 Pengelolaan perikanan yang berdaya saing									
IK 11 Tingkat kinerja penerapan pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (persen)									
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	77	78	87	112,99	-	-

Pada tahun 2024, IK Tingkat kinerja penerapan pelaksanaan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) telah tercapai 87% dari target 78%, dengan persentase realisasi terhadap target sebesar 112,99%.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Tingkat Penerapan Pelaksanaan SHTI Tahun 2024, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan SHTI sepenuhnya telah dilakukan melalui aplikasi Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan di 32 Otoritas Kompeten Lokal (OKL) dan 46 pelabuhan perikanan non OKL penerbit Lembar Awal .
2. Perkembangan penerbitan SHTI pada periode Januari sampai dengan Desember 2024 sebanyak 34.238 dokumen yang terdiri dari SHTI Lembar Turunan 28.936 dokumen, SHTI Lembar Turunan Yang Disederhanakan 4.697 dokumen, dan Pernyataan Pengolahan sebanyak 605 dokumen. Jumlah penerbitan Lembar Awal sebanyak 102.536 dokumen yang terdiri dari LA 27.413 dokumen dan LA-B sebanyak 75.123 dokumen.
3. Pelaksanaan Peningkatan SDM Petugas SHTI melalui Pelatihan penyegaran Penggunaan aplikasi SHTI, pada tanggal 20 Desember 2024 sebanyak jumlah SDM operator Lembar Awal saat ini sebanyak 150 orang dan jumlah petugas SHTI sebanyak 75 orang.
4. Permintaan verifikasi keabsahan dokumen SHTI dari negara tujuan ekspor (Belanda, Denmark, Equador, Inggris, Jerman, Perancis, Slovenia, Spanyol, Swiss, Taiwan, Thailand, Yunani) sebanyak 18 dokumen.
5. Pelaksanaan Rapat Teknis Penerapan SHTI di Ruang Rapat *Quaywall* Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada tanggal 3 Desember 2024 yang dihadiri oleh perwakilan seluruh Pelabuhan OKL dan Pelabuhan UPT daerah yang menerbitkan Lembar awal. Hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penerapan SHTI adalah:
 - a. Belum semua kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapannya diterbitkan Lembar awal, saat ini Lembar awal hanya diterbitkan berdasarkan permohonan.
 - b. Masih adanya kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah konvensi RFMO namun belum terdaftar di RFMO *Authorized Vessels List*.
6. Berdasarkan hal tersebut di atas, Tingkat kinerja penerapan pelaksanaan SHTI tahun 2024 telah mencapai target 88% dari target IKU 78%.
7. Beberapa upaya yang akan dilakukan guna peningkatan penerapan SHTI di Tahun 2025, diantaranya:
 - 1) Penyesuaian aplikasi SHTI dengan ketentuan amandemen EC Regulation 1008/2005 yang mewajibkan bagi Negara Anggota UE dan importir UE untuk menggunakan sistem informasi teknologi CATCH bagian dari TRACES NT dalam proses penerbitan SHTI yang akan diimplementasikan mulai 10 Januari 2026.
 - 2) Meningkatkan penerapan LA di Pelabuhan Perikanan.
 - 3) Pengembangan aplikasi SHTI dengan terintegrasi dengan aplikasi di DJPT seperti TemanSPB, PIPP, eLogbook, dan RFMO.
 - 4) Peningkatan pemahaman dan kompetensi OKL beserta petugas penerbitan SHTI.

Sasaran Kegiatan (SK) 3 – Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal

Indikator Kinerja (IK) pada SK 3 yaitu:

- Pelabuhan pangkalan yang menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
- Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pascaproduksi.
- Tingkat penerapan PNBP Pascaproduksi di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan.
- Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan *fish market* bertaraf internasional yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri.
- Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep *Eco Fishing Port* yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri.

Indikator Kinerja (IK) 12 – Pelabuhan pangkalan yang menerapkan Penangkapan Ikan Terukur

Pelabuhan pangkalan yang menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) adalah pelabuhan pangkalan yang telah memenuhi kriteria yaitu lokasi pangkalan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Tabel 17. Capaian IK “Pelabuhan pangkalan yang menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)”

SK 3 Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal									
IK 12 Pelabuhan pangkalan yang menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) (Pelabuhan)									
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	296	296	296	100	-	-

Pelaksanaan penangkapan ikan terukur tahun 2024 didasarkan pada Surat Edaran Nomor B.1954/MEN-KP/XI/2023 tentang Relaksasi Kebijakan Pada Masa Transisi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur, yang diperbaharui dengan Surat Edaran Nomor B.2403/MEN-KP/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Transisi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur.

Beberapa poin dalam Surat Edaran ini antara lain sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai kuota penangkapan ikan pada zona penangkapan ikan terukur belum diberlakukan dan pemerintah melakukan reviu terhadap data perikanan tangkap.

2. Ketentuan terkait pelabuhan pangkalan dalam perizinan berusaha;
3. Ketentuan terkait alih muatan di daerah penangkapan ikan;
4. Ketentuan terkait migrasi perizinan berusaha subsector penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsector pengangkutan ikan;
5. Kewajiban pemasangan dan pengaktifan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) untuk kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan;

Pada tahun 2024, telah dilakukan evaluasi pelabuhan pangkalan bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk menentukan pelabuhan pangkalan yang akan ditetapkan menjadi pelabuhan pangkalan PIT dan PNBP Pasca Produksi pada tahun 2025.

Indikator Kinerja (IK) 13 – Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pascaproduksi

Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pascaproduksi adalah pelabuhan pangkalan yang telah memenuhi dua kriteria, yaitu:

- a. Lokasi pelabuhan pangkalan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- b. PNBP Pascaproduksi pada pelabuhan pangkalan telah direalisasikan.

Tabel 18. Capaian IK “Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pascaproduksi”

SK 3		Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal								
IK 13		Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)								
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT		
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	81	90	127	141,11	-	-	

Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi pada tahun 2024 tercapai 127 pelabuhan dari target 90. Hal ini didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan pangkalan dan penempatan petugas enumerator kelautan dan perikanan. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat penambahan 46 pelabuhan pangkalan. Hal ini juga dikarenakan adanya proses migrasi kapal dengan izin daerah yang beroperasi diatas 12 mil menjadi izin pusat di beberapa pelabuhan pangkalan UPTD. Pelabuhan Pangkalan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 19. Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi

NO	PELABUHAN PANGKALAN	JUMLAH BILLING	JUMLAH PNBP LUNAS
1	PP. Nizam Zachman Jakarta	8.967	247.478.074.275
2	PP. Tegalsari	4.285	99.694.626.044

NO	PELABUHAN PANGKALAN	JUMLAH BILLING	JUMLAH PNPB LUNAS
3	PU.Benoa	5.330	85.636.641.346
4	PP. Bajomulyo	4.951	66.594.479.964
5	PP. Muara Angke	4.897	57.667.844.119
6	PP. Bitung	4.728	53.223.474.495
7	PP. Sibolga	1.364	35.785.681.038
8	PP. Mayangan	1.392	33.614.921.372
9	PU. Tanjung Wangi	331	27.462.048.730
10	PP. Tasik Agung	3.787	21.681.143.254
11	PP. Karangsong	575	21.121.877.772
12	PP. Dobo	477	15.506.182.740
13	PP. Kluwut	696	12.879.231.751
14	PP. Cilacap	1.495	11.567.663.254
15	PP. Baran	822	9.882.697.396
16	PP. Tanjung Balai Asahan	427	8.938.321.117
17	PP. Palabuhanratu	725	7.939.911.673
18	PP. Kejawanen	546	7.693.166.018
19	PP. Pekalongan	563	7.576.429.489
20	PP. Sorong	382	7.488.128.960
21	PP. Poumako	300	5.007.298.362
22	PP. Pemangkat	540	4.363.751.084
23	PP. Belawan	2.734	4.347.880.871
24	PP. Barelang	237	4.112.671.395
25	PP. Fandoi	257	3.721.123.927
26	PP. Tual	139	3.654.307.273
27	PP. Klidang Lor	663	2.811.638.333
28	PP. Tumumpa	2.453	2.784.672.388
29	PP. Sungai Rengas	284	2.569.289.884
30	PP. Kendari	3.556	2.529.600.809
31	PP. Tamperan	278	2.452.986.859
32	PP. Merauke	331	1.650.758.435

NO	PELABUHAN PANGKALAN	JUMLAH BILLING	JUMLAH PNBP LUNAS
33	PP. Labuan Uki	483	1.534.771.042
34	PP. Eretan Wetan	293	1.385.322.217
35	PP. Dompok	168	1.362.119.755
36	PP. Ambon	141	1.317.378.559
37	PP. Selat Lampa	101	1.290.887.536
38	PP. Kijang	929	1.272.131.252
39	PP. Popoh	17	1.236.780.504
40	PP. Kema	481	1.153.592.984
41	PP. Bacan	806	1.058.018.589
42	PP. Teluk Awang	26	1.040.007.217
43	PP. Labuhan Lombok	1.991	1.017.059.292
44	PP. Karanganyar	2.882	934.846.229
45	PP. Tenau Kupang	1.637	777.331.874
46	PP. Tenda	1.834	774.617.613
47	PP. Sanggeng	115	719.674.037
48	PP. Tanjung Limau Bontang	1.788	691.152.484
49	PP. Sarang	908	685.169.463
50	PP. Belang	492	633.427.452
51	PP. Lampulo	130	630.220.291
52	PP. Dodepo	1.509	628.114.875
53	PP. Dufa-Dufa	651	611.694.363
54	PP. Sadeng	170	609.555.115
55	PP. Selakau	84	557.444.804
56	PPN Tual	34	500.517.121
57	PP. Lappa	1.335	448.629.945
58	PP. Donggala	1.751	430.705.811
59	PP. Tilamuta	805	406.152.296
60	PP. Gentuma	680	377.316.911
61	PP. Ogotua	1.084	377.057.064
62	PP. Jakabaring	23	290.077.630

NO	PELABUHAN PANGKALAN	JUMLAH BILLING	JUMLAH PNBP LUNAS
63	PP. Inengo	1.770	266.403.280
64	PP. Blanakan	284	262.255.765
65	PP. Sambaliung	184	257.434.558
66	PP. Oeba (Kupang)	1.021	253.541.487
67	PP. Ternate	387	245.904.463
68	PP. Marisa	1.172	244.540.898
69	PP. Masami	2	215.486.640
70	PP. Prigi	105	186.448.814
71	PP. Muara Sungai Baturusa	312	180.897.010
72	PP. Tobelo	144	164.647.951
73	PP. Kedonganan	275	161.150.027
74	PP. Bungus	182	140.138.390
75	PP. Kotabaru atau Saijaan	51	134.139.075
76	PP. Beba	140	133.281.315
77	PP. Kasiwa (Kasiwah)	1.079	132.706.174
78	PP. Sungai Kakap	75	126.679.230
79	PP. Batulicin	14	123.085.695
80	PP. Brondong	186	115.187.151
81	PP. Jobokuto (Ujung Batu)	503	112.900.056
82	PP. Muncar	164	102.409.311
83	PP. Goto	167	95.853.040
84	PP. Dagho	689	91.497.685
85	PP. Pondok Dadap	248	88.833.219
86	PP. Sebatik	119	85.721.880
87	PP. Idi	149	76.943.359
88	PP. Sodohoa	196	73.213.788
89	PP. Untia	229	73.114.119
90	PP. Klademak	190	71.710.280
91	PP. Manggar Baru	60	71.165.414
92	PP. Karangantu	2	68.773.300

NO	PELABUHAN PANGKALAN	JUMLAH BILLING	JUMLAH PNBP LUNAS
93	PP. Muara Piluk Bakauheni	9	65.023.385
94	PP. Pulau Baai	9	57.570.550
95	PP. Banjarmasin	56	55.597.206
96	PP. Tanjung Wangi	4	55.185.700
97	PP. Ampana	257	51.505.135
98	PP. Binuangen	176	49.544.455
99	PP. Tanjung Pandan	16	47.485.045
100	PP. Amurang	94	42.380.375
101	PP. Lonrae	121	41.205.125
102	PP. Kuala Tungkal	2	33.084.440
103	PP. Sungailiat	42	28.927.650
104	PP. Morodemak	196	27.455.579
105	PP. Kronjo	38	26.012.492
106	PP. Bonto Bahari Maros	96	23.071.137
107	PP. Cempae	52	16.498.463
108	PP. Tanjung Luar	38	11.396.940
109	PP. Masohi	15	9.719.900
110	PP. Wameo	71	9.390.300
111	PP. Selili	12	9.039.580
112	PP. Mangolo	3	7.551.550
113	PP. Palipi	45	5.956.900
114	PP. Lero	29	5.359.835
115	PP. Labuhan Maringgai	8	5.109.580
116	PP. Moro	4	5.012.105
117	PP. Kwandang	19	4.059.585
118	PP. Tarakan (Tengkayu II)	22	3.061.425
119	PP. Amagarapati	6	2.380.500
120	PP. Bonto Bahari Bulukumba	11	2.022.300
121	PP. Sape	2	1.254.000
122	PP. Numana	5	1.116.570

NO	PELABUHAN PANGKALAN	JUMLAH BILLING	JUMLAH PNBP LUNAS
123	PP. Muara Kintap	4	405.000
124	PP. Muara Ciasem	1	380.600
125	PP. Kajang	1	350.000
126	PP. Pasar Wajo	1	200.000
127	PP. Pagimana	1	139.500
TOTAL		93.425	909.250.815.032

Faktor Penghambat dari IK ini yaitu:

1. Masih ada pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam melaporkan hasil tangkapan ikan, baik jumlah maupun jenisnya;
2. Fasilitas kantor belum memadai;
3. Kurangnya dukungan pemerintah daerah atas pelaksanaan penarikan PNBP Pasca Produksi di pelabuhan pangkalan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat yaitu:

1. Sosialisasi terhadap para pelaku usaha terkait dengan regulasi dan dampak apabila ikan yang didaratkan tidak dilaporkan sesuai dengan hasil yang ditangkap;
2. Rehabilitasi dan Pembangunan KPSP di pelabuhan pangkalan;
3. Rapat koordinasi teknis dengan pemerintah daerah terkait.
4. Menugaskan ASN DJPT Pusat di pelabuhan pangkalan UPT Daerah untuk mendukung pelaksanaan PNBP Pasca Produksi.

Indikator Kinerja (IK) 14 – Tingkat penerapan PNBP Pascaproduksi di pelabuhan perikanan yang ditetapkan.

Indikator kinerja ini memiliki 3 kriteria yang harus dipenuhi oleh pelabuhan pangkalan dalam pelaksanaan PNBP Pascaproduksi yaitu:

- a. Persentase ketersediaan SDM pendukung penerapan PNBP Pascaproduksi (ketersediaan SDM dibanding dengan kebutuhan SDM).
- b. Persentase jumlah kapal perikanan izin pusat yang berkontribusi terhadap PNBP Pasca Produksi (jumlah kapal yang kontribusi/kapal izin pusat).
- c. Persentase pendataan produksi ikan hasil tangkapan dari pendaratan kapal izin pusat (perbandingan pelabuhan perikanan yang menyampaikan data dengan kepatuhan input di website PIPP).

Tabel 20. Capaian IK “Tingkat penerapan PNBP Pascaproduksi di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan”

SK 3	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal									
IK 14	Tingkat penerapan PNBP Pascaproduksi di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan (Nilai/Skala)									
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT		
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	89	89	96	107,87	-	-	

Pada tahun 2024, tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan telah mencapai 98% dari target 89%. Hal ini didukung oleh penambahan jumlah pelabuhan pangkalan melalui proses migrasi kapal dengan izin daerah yang beroperasi diatas 12 mil menjadi izin pusat di beberapa pelabuhan pangkalan UPTD.

Faktor Penentu Keberhasilan dari capaian IK ini adalah:

1. Bimtek petugas enumerator kelautan dan perikanan;
2. Penyediaan sarana dan prasarana petugas enumerator kelautan dan perikanan;
3. Penambahan jumlah petugas enumerator kelautan dan perikanan dari 506 menjadi 606 petugas.
4. Pendampingan dari UPT Pelabuhan Perikanan yang ditunjuk sebagai Pembina atau penanggungjawab.

Faktor Penghambat dari capaian IK ini adalah:

1. Masih ada pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam melaporkan hasil tangkapan ikan, baik jumlah maupun jenisnya;
2. Fasilitas kantor belum memadai;
3. Kurangnya dukungan pemerintah daerah atas pelaksanaan penarikan PNBP Pasca Produksi di pelabuhan pangkalan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat yaitu:

1. Sosialisasi terhadap para pelaku usaha terkait dengan regulasi dan dampak apabila ikan yang didaratkan tidak dilaporkan sesuai dengan hasil yang ditangkap;
2. Rehabilitasi dan Pembangunan KPSP di pelabuhan pangkalan;
3. Rapat koordinasi teknis dengan pemerintah daerah terkait;
4. Pembuatan Juknis berupa Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 37 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Harga Ikan di Pelabuhan Pangkalan;
5. Bimtek petugas enumerator kelautan dan perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 15 – Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan *Fish Market* bertaraf internasional yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri.

Indikator ini menunjukkan Persentase pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN dan telah dilakukan perjanjian pendanaan (*Loan Agreement*). Penyiapan pelabuhan perikanan ini dalam rangka pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan Pasar Ikan bertaraf Internasional.

Tabel 21. Capaian IK “Persentase pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan fish market bertaraf internasional yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri”

SK 3	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal									
IK 15	Persentase pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan <i>fish market</i> bertaraf internasional yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri (persen)									
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT		
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	100	100	90	90	-	-	

Pada tahun 2024, beberapa indikator kinerja Proyek *Integrated of Fishing Port and International Fish Market Phase I* adalah sebagai berikut:

1. Tindak lanjut *Loan Effective* (20%)

Proyek IFP-IFM Phase I Lender IsDB telah *Loan Effective* pada tanggal 18 Desember 2023. Beberapa tindak lanjut pada tahun 2024 pasca *Loan Effective* diantaranya adalah:

a. Pembukaan rekening khusus (10%)

Rekening khusus adalah Rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan (*revolving*) saldonya setelah dipertanggungjawabkan kepada pemberi PHLN. Rekening Khusus ini merupakan salah satu syarat yang diperlukan dalam mekanisme penarikan anggaran dari *lender* IsDB. Pembukaan Rekening khusus telah diproses berdasarkan surat Direktur Pengelolaan Kas Negara, Kementerian Keuangan (Nomor S-59/PB/PB.3/2024) pada tanggal 5 Februari 2024 tentang pemberitahuan atas pembukaan rekening khusus untuk kegiatan *Integrated Fishing Ports and International Fish Market Phase I* (IDN-1055)

b. Proses permohonan pengisian *Initial Deposit* Rekening khusus dan permohonan nol (10%)

Setelah adanya Rekening khusus, telah dilakukan *initial deposit* untuk *first disbursement* Rekening Khusus (Reksus) sebesar Rp2.970.284.854,30 (*equivalent* EUR173.946,53) pada tanggal 27 Februari 2024. Sesuai ketentuan *Guideline* IsDB mensyaratkan pengisian ulang

(*replenishment*) sebesar 50% atau setara dengan EUR86.973,27. Pada tanggal 2 September 2024, saldo rekening telah memenuhi syarat, yaitu sebesar EUR 96.825,86 (55,66%). Atas dasar tersebut, permohonan audit diajukan kepada BPKP pada tanggal 17 September 2024, dengan pelaksanaan audit dilakukan dari tanggal 25 September - 8 Oktober 2024. Hasil reviu dari BPKP dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2024 (PE.01.03/S-642/D1/05/2024) dan *replenishment* dilakukan pada tanggal 11 November 2024 sebesar Rp5.558.206.404,15 (*equivalent* EUR 329.033,00) sehingga total saldo yang tersedia pada tahun 2024 sebesar Rp8.528.491.258,45 (*equivalent* EUR 502.979,53). Saldo rekening khusus Proyek *Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase-I (IDN-1055)* sesuai dengan Rekening Koran Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp585.234.614,16 (*equivalent* EUR 34.788,45).

2. Pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan pasar ikan bertaraf Internasional (80%)

a. Pendampingan sekaligus fungsi administrasi untuk kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan pasar ikan bertaraf internasional yang dikembangkan berupa penyusunan perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan (20%)

Pendampingan sekaligus fungsi administrasi untuk kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan pada Proyek IFP-IFM Phase I telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya adalah:

- Kegiatan Rapat Koordinasi (Sosialisasi) Rencana Pengembangan PPN Pengambengan dengan Pelaku Usaha di PP Benoa yang telah dilaksanakan pada 23-26 Juli 2024 di Bali. Rapat koordinasi ini dihadiri dari berbagai instansi, pemerintah daerah, stakeholder, dan pelaku usaha terkait. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah penyampaian informasi mengenai rencana pengembangan PPN Pengambengan kepada para pelaku usaha di Pelabuhan Benoa serta membangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan rencana pengembangan PPN Pengambengan.
- Kegiatan Overseas Training yang dilaksanakan pada tanggal 23 – 30 November 2024 di Turki. Kegiatan ini dihadiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, dan IsDB. Kegiatan *overseas training* ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru dan pemahaman yang mendalam kepada peserta mengenai sistem dan mekanisme yang diterapkan dalam pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, termasuk penetapan dan implementasi kuota perikanan tangkap berkelanjutan yang dapat diterapkan di Indonesia. Pada kegiatan ini, KKP berkolaborasi dengan *General Directorate of Fisheries and Aquaculture (BSGM)* dan *Turkish Marine Research Foundation (TÜDAV)*.

b. Tandatanganan kontrak jasa konsultansi (PMC dan CMC) untuk lokasi proyek IFP-IFM Phase I (20%)

- *Project Management Consultant*

Project Management Consultant (PMC) bertanggung jawab membantu dalam mengelola pelaksanaan proyek secara efektif sesuai dengan kebijakan dan pedoman pengadaan ISDB, persyaratan keamanan (*guidelines*), peraturan pemerintah yang relevan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Seleksi Jasa Konsultansi PMC Proyek IFP-IFM Phase I telah dilaksanakan melalui Tender oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa dimulai dari September 2023 – Oktober 2024 dan dimenangkan oleh PT. Virama Karya. Penandatanganan kontrak antara Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PPK Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan PT. Virama Karya telah dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp12.300.125.000, dengan durasi kerja PMC ini selama 55 (lima puluh lima) bulan dari Oktober 2024 – April 2028. Pada tahun 2024, juga telah dilaksanakan pembayaran uang muka sebesar RP1.845.018.750 kepada PMC melalui mekanisme pembayaran *Direct Payment*.

Pada saat pelaksanaan proses seleksi hingga penandatanganan kontrak PMC ini memiliki beberapa kendala diantaranya adalah:

1. Jadwal Pengadaan Barang dan Jasa yang mundur 9 (Sembilan) bulan dari waktu yang telah direncanakan sebelumnya
2. Proses Penetapan Pemenang yang tertunda karena adanya Reviu Rencana Pengembangan Pelabuhan Perikanan.
3. Semua proses kegiatan memerlukan persetujuan No Objection Letter (NOL) dari lender.
4. Pergantian Kuasa pengguna Anggaran/Dirjen Perikanan Tangkap
5. Proses reviu kebijakan lokasi dan anggaran di masing-masing pelabuhan perikanan

- *Construction Management Consultant*

Construction Management Consultant (CMC) bertanggung jawab dalam mempersiapkan dokumen DED/*Review Desain*, dokumen tender, serta mengawasi pekerjaan konstruksi (Manajemen Konstruksi) dan mengelola proyek agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal. Seleksi Jasa Konsultansi CMC Proyek IFP-IFM Phase I telah dilaksanakan melalui Tender oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa dimulai dari September 2023 – November 2024 dan dimenangkan oleh PT. Yodya Karya (Persero) JV PT. Artefak Arkindo. Penandatanganan kontrak antara KKP melalui PPK Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan PT. Virama Karya telah dilakukan pada tanggal 22 November 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 24.349.450.000. dengan durasi kerja CMC ini selama 55 bulan dari November 2024 – Mei 2028. Pada tahun 2024, juga telah dilaksanakan Pembayaran Uang Muka sebesar RP 3.652.417.500 kepada CMC melalui mekanisme pembayaran *Direct Payment*.

Pada saat pelaksanaan Proses Seleksi hingga Penandatanganan Kontrak CMC ini memiliki beberapa kendala diantaranya adalah:

1. Jadwal Pengadaan Barang dan Jasa yang mundur 9 (Sembilan) bulan dari waktu yang telah direncanakan sebelumnya.
2. Proses Penetapan Pemenang yang tertunda karena adanya Reviu Rencana Pengembangan Pelabuhan Perikanan.
3. Semua proses kegiatan memerlukan persetujuan No Objection Letter (NOL) dari lender.
4. Pergantian Kuasa pengguna Anggaran/Dirjen Perikanan Tangkap.
5. Proses reviu kebijakan lokasi dan anggaran di masing-masing pelabuhan perikanan.

c. Pengendalian perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan pasar ikan bertaraf internasional (20%)

Pengendalian Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan pasar ikan bertaraf internasional dilakukan melalui:

- Kegiatan Start Up Workshop yang telah dilaksanakan pada 19-22 Juni 2024 di Bali. Kegiatan ini merupakan bimbingan teknis yang diikuti oleh PIU (PPN Kejawanan dan PPN Pengambengan) yang membahas bagaimana cara pengelolaan proyek pengembangan pelabuhan perikanan yang efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi.
- Koordinasi berkala antara PMU dan PIU. Koordinasi ini bisa berupa rapat, peninjauan kondisi lapangan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala antara PMU dan PIU. Selain itu juga telah dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri IsDB, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, PMU, dan PIU sesuai dengan Kepmen KP 131 tahun 2023. Pada kegiatan tersebut dibahas progres dari Proyek IFP -IFM Phase I Lender IsDB baik dari segi kegiatan dan anggaran termasuk kendala yang dialami saat pelaksanaan proyek. Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah untuk: (i) Mengevaluasi pencapaian proyek hingga 2024; (ii) Merumuskan strategi pengelolaan proyek dan pelaporan keuangan; dan (iii) Menyusun rencana kerja (*Action Plan*) dan rencana penarikan dana (*Disbursement Plan*) untuk tahun 2025.
- Kegiatan pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup di PSLH UGM -Yogyakarta yang melibatkan pelabuhan perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Pelatihan ini terbagi menjadi dua jenis Pelatihan yaitu:
 1. Pelatihan Pengendalian Pencemaran Air dan Sertifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 23 Agustus 2024;
 2. Pelatihan Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (PPPL) dan Kunjungan Lapangan ke PPP Sadeng tanggal 14-28 Agustus 2024.

Total peserta yang berpartisipasi pada pelatihan ini sebanyak 17 orang yang terdiri dari staf pusat dan perwakilan pelabuhan perikanan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

- Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan pembahasan program mutu pada Konsultan PMC dan CMC pada tanggal 12-13 Desember 2024 di Aloft Hotel Jakarta yang dipimpin oleh Katimja P4LN dan dihadiri oleh Pejabat Fungsional P3T Ahli Utama, Kepala Pelabuhan PPN Kejawanan, Bapak Yann Faisal dari Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Kementerian PU, PMU Expert Proyek IFP-IFM Phase-I, Konsultan PMC (PT Virama Karya), Konsultan CMC (PT Yodya Karya JV Artefak Arkindo), Tim Proyek P4LN, serta perwakilan dari Direktur Pinjaman dan Hibah - Kemenkeu, Pendanaan Multilaretal -€“ Bappenas, Inspektorat II - KKP, Biro Perencanaan - KKP, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa - KKP, Perwakilan PPN Pengembangan, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, dan Perwakilan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Tujuan dari rapat ini adalah untuk menyampaikan Proram Mutu oleh CMC (PT Yodya Karya JV Artefak Arkindo) sebagai tindak lanjut setelah ditandatanganinya Kontrak CMC Proyek IFP-IFM Phase-I (IDN-1055) pada tanggal 22 November 2024 dan sarana diskusi untuk menyusun langkah pelaksanaan proyek secara optimal.

d. Penyiapan dokumen tender pekerjaan konstruksi untuk 2 lokasi (PPN Kejawanan dan PPN Pengembangan) (10%)

Penyiapan dokumen Tender pekerjaan konstruksi dilakukan oleh CMC yang dibantu PMC dan PMU. Beberapa dokumen yang dibutuhkan diantaranya adalah Term of Reference (TOR), Request For Proposals (RFP), dan Letter of Invitation (LoI). Pada saat ini, CMC Juga telah melakukan pengambilan data ke masing masing lokasi pelabuhan sebagai data dukung dalam pembuatan perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 16 – Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan *Eco Fishing Port* yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri.

Indikator ini menunjukkan persentase pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN dan telah dilakukan perjanjian pendanaan (*Loan Agreement*). Penyiapan pelabuhan perikanan ini dalam rangka pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan.

Tabel 22. Capaian IK “Persentase pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan Eco Fishing Port yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri”

SK 3		Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal							
IK 16		Persentase pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan <i>Eco Fishing Port</i> yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri (persen)							
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	100	100	70	70	-	-

Pada tahun 2024, IK Persentase pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan *Eco Fishing Port* yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri telah tercapai 70% dari target 100%, dengan persentase realisasi dari target sebesar 70%.

Beberapa indikator kinerja Proyek Outer Ring Fishing Port Development (*Eco Fishing Port*) adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan sekaligus fungsi administrasi untuk kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan berupa penyusunan perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan. (25%)

Pendampingan sekaligus fungsi administrasi untuk kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan pada Proyek *Outer Ring Fishing Port Development (Eco Fishing Port)* telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya adalah:

- Kegiatan Rapat Koordinasi (Sosialisasi) Rencana Pengembangan PPS Bitung dengan Pelaku Usaha di PPS Bitung yang telah dilaksanakan pada 23-25 September 2024 di PPS Bitung. Rapat koordinasi ini dihadiri dari berbagai instansi, pemerintah daerah, stakeholder, dan pelaku usaha terkait. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah Penyampaian informasi mengenai rencana pengembangan PPS Bitung dan konfirmasi awal atas kebutuhan fasilitas bagi pelaku usaha. Target participant kegiatan ini adalah para pelaku usaha di PPS Bitung. selain itu kegiatan ini diharapkan dapat membangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan rencana pengembangan PPS Bitung.
- Kegiatan Rapat Koordinasi (Sosialisasi) Rencana Pengembangan PPS Cilacap dengan Pelaku Usaha di PPS Bitung yang telah dilaksanakan pada 14 November 2024 di PPS Cilacap. Rapat koordinasi ini dihadiri dari berbagai instansi, pemerintah daerah, stakeholder, dan pelaku usaha terkait. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah Penyampaian informasi mengenai rencana pengembangan PPS Cilacap dan konfirmasi awal atas kebutuhan fasilitas bagi pelaku usaha. Target participant kegiatan ini adalah para pelaku usaha di PPS Cilacap. selain itu kegiatan ini diharapkan dapat

membangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan rencana pengembangan PPS Cilacap.

- Kegiatan Rapat Koordinasi (Sosialisasi) Rencana Pengembangan PPS Kendari dengan Pelaku Usaha di PPS Kendari yang telah dilaksanakan pada 14-15 Oktober 2024 di PPS Kendari. Rapat koordinasi ini dihadiri dari berbagai instansi, pemerintah daerah, stakeholder, dan pelaku usaha terkait. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah Penyampaian informasi mengenai rencana pengembangan PPS Kendari dan konfirmasi awal atas kebutuhan fasilitas bagi pelaku usaha. Target participant kegiatan ini adalah para pelaku usaha di PPS Kendari. selain itu kegiatan ini diharapkan dapat membangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan rencana pengembangan PPS Kendari.
- Pendampingan oleh KPP untuk kegiatan Gender studies dari AFD untuk pelabuhan prioritas proyek AFD. kegiatan ini dilakukan oleh konsultan dimulai dari September 2023 sd September 2024 dan dibiayai oleh hibah AFD. Kegiatan ini bertujuan untuk mendefinisikan dan melaksanakan kegiatan yang khusus terkait dengan gender dalam mencapai tujuan Proyek *Eco Fishing Ports*, serta berkontribusi dalam mengintegrasikan kesetaraan gender dalam pengembangan pelabuhan perikanan di Indonesia guna mendukung partisipasi, pekerjaan, dan perlindungan perempuan dalam sektor perikanan. Pada implementasi hibah tersebut dinilai perlu untuk melakukan addendum untuk penambahan waktu pelaksanaan kegiatan dan nilai hibah, maka pada telah ditandatangani amandemen pada 24 September 2024 dengan penambahan nilai hibah sebesar EUR 30.000,00 sehingga nilai total anggaran menjadi EUR 120.000,00 (ekuivalen Rp2.023.168.200,00) dan perpanjangan waktu implementasi kegiatan hingga bulan Desember 2025. Amandemen ini telah disesuaikan berdasarkan durasi dan nilai pada sistem Kemenkeu (No.S-657/PR.8/2024).
- Kegiatan Overseas Training in Port Management and Fisheries Sector ke Port Boulogne yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei s/d 1 Juni 2024 di Paris. Kegiatan ini dihadiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, dan AFD. Kegiatan overseas training ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru dan pemahaman yang mendalam kepada peserta mengenai sistem dan mekanisme yang diterapkan dalam pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, termasuk penetapan dan implementasi kuota perikanan tangkap berkelanjutan yang dapat diterapkan di Indonesia. Pada kegiatan ini, KKP berkolaborasi dengan Pelabuhan perikanan Boulogne
- Kegiatan *Eco Fishing Port Project Outlook and Yearly Evaluation Meeting 2024* pada tanggal 3-6 Desember 2024 di Yogyakarta. Pada kegiatan ini dibahas mengenai progress dan evaluasi proyek EFP bersama dengan instansi lainnya (kemenkeu, Bappenas, dll) dan laporan realisasi anggaran TA. 2024 serta strategi dan timeline pelaksanaan proyek tahun 2025. Total peserta yang berpartisipasi pada penelitian ini sebanyak 39 orang yang terdiri Kemenkeu, Bappenas, lender AFD, PMU, dan PIU.

2. Pengendalian perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan (25%)

Pengendalian perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan telah dilakukan sesuai dengan prinsip ketentuan dalam Loan Agreement dan pembangunan berkelanjutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pengendalian proyek Eco Fishing Port TA. 2025 diantaranya:

- **Koordinasi berkala antara PMU dan PIU.** Koordinasi ini bisa berupa rapat, peninjauan kondisi lapangan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala antara PMU dan PIU. Selain itu juga telah dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri IsDB, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, PMU, dan PIU sesuai dengan Kepmen KP 87 tahun 2023 tentang Tim Pengelola Pelaksanaan Proyek *Outer Ring Fishing Ports Development (Eco Fishing Port)* melalui Pinjaman Luar Negeri dari Agence Française de Development. Pada kegiatan tersebut dibahas progres dari Proyek Eco Fishing Port Lender AFD baik dari segi kegiatan dan anggaran termasuk kendala yang dialami saat pelaksanaan proyek. Selain itu juga dibahas Rencana Kerja dan Timeline Tahun Anggaran 2025.
- **Kegiatan *Steering Committee Meeting and Technical Committee Meeting*** yang telah dilaksanakan pada 23 Januari 2024 di Hotel Mandarin Oriental DKI Jakarta. Kegiatan ini merupakan rapat Komite pengarah dan Komite Teknis yang melibatkan KKP, Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan dan Lender AFD. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas perubahan atau arahan strategis pembangunan dan pengambilan keputusan strategis dalam proyek *Eco Fishing Port* yang selanjutnya diketahui dan disepakati bersama dalam rapat.
- **Kegiatan pelatihan Peningkatan kompetensi Petugas Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)** dilaksanakan pada tanggal 29 Okt - 01 Nov 2024 di Pelabuhan Perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Tegal. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kapasitas petugas CPIB di Pelabuhan Perikanan dan Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staff pelabuhan terkait cara penanganan ikan yang baik dalam rangka memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan sektor perikanan tangkap. Total peserta yang berpartisipasi pada pelatihan ini sebanyak 36 orang yang terdiri dari staf pusat dan perwakilan pelabuhan perikanan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
- **Kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Enumerator Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)** dilaksanakan pada tanggal 5-8 Nov 2024 di Hotel Santika Jakarta yang melibatkan pelabuhan perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan komitmen para petugas operator terkait dengan pentingnya PIPP dalam rangka mendukung kegiatan penerapan penangkapan ikan terukur dan PNBP pascaproduksi, terlatihnya para enumerator baru untuk menggunakan aplikasi PIPP, meningkatkan kualitas dan validitas data dan informasi yang dihasilkan, sinkronisasi data yang dikeluarkan

pelabuhan perikanan, inventarisasi kendala dan permasalahan dalam menjalankan aplikasi PIPP dan upaya pemecahannya, dan mendapatkan masukan dan saran untuk perbaikan dan pengembangan PIPP. Total peserta yang berpartisipasi pada pelatihan ini sebanyak 71 orang yang terdiri dari staf pusat dan petugas pendataan (*enumerator*) perwakilan pelabuhan perikanan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

- **Kegiatan pelatihan Peningkatan kapasitas Enumerator untuk mendukung penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota** pada level pelabuhan yang dilaksanakan tanggal 19 - 22 Nov 2024 di PPS Cilacap yang melibatkan pelabuhan perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap proses administrasi dalam rangka mendukung optimalisasi program prioritas, meningkatnya akurasi pendataan dan pelaporan data produksi kapal perikanan di pelabuhan pangkalan, meningkatkan realisasi PNBP SDA perikanan, meningkatkan kapasitas dan pemahaman SDM Pelabuhan pangkalan pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota. Total peserta yang berpartisipasi pada pelatihan ini sebanyak 53 orang yang terdiri dari staf pusat dan petugas pendataan (*enumerator*) perwakilan pelabuhan perikanan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap .

3. Tanda tangan kontrak jasa konsultasi TAO/PMC dan CMC. (25%)

- **Jasa konsultasi *Technical Assistant to The Owner* (TAO)**

Technical Assistant to the Owner (TAO) bertanggung jawab atas manajemen proyek, Penyusunan Dokumen Perencanaan *Design and Build*, dokumen tender, dukungan teknis, pengawasan konstruksi, evaluasi, dan pemenuhan komponen TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Tugas TAO termasuk pengawasan pelaksanaan kontrak, penyiapan dokumen tender, pemantauan kerja konstruksi, serta memberikan nasihat teknis dan finansial kepada PMU. Kegiatan pengadaan jasa konsultasi TAO. Seleksi Jasa Konsultasi TAO Proyek *Eco Fishing Port* telah dilaksanakan melalui Seleksi *International Competitive Bidding* (ICB) oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa dimulai dari Agustus 2023 – Januari 2025 dengan HPS senilai Rp. 88.167.426.000. Proses pengadaan jasa konsultasi TAO telah mendapatkan NOL dari AFD untuk *Term of Reference* (TOR), *Request for Expression of Interest* (REOI), dan *Request for Proposal* (RFP) dan NOL Evaluasi Gabungan. Saat ini sedang tahap akhir pengadaan yaitu tahap negosiasi kontrak dengan calon konsultan terpilih yaitu PT Haskoning JV Co Freche dengan kontrak diperkirakan minggu ke-3 Januari 2025.

Pada saat pelaksanaan Proses Seleksi Jasa Konsultasi TAO hingga Penandatanganan Negosiasi Kontrak memiliki beberapa kendala diantaranya adalah:

- Jadwal Pengadaan Barang dan Jasa yang mundur 9 (Sembilan) bulan dari waktu yang telah direncanakan sebelumnya.
- Proses Persetujuan No Objection Letter (NOL) dari lender AFD membutuhkan waktu yang cukup lama.
- Pergantian Kuasa pengguna Anggaran/Dirjen Perikanan Tangkap.

- Proses revidi kebijakan lokasi dan anggaran di masing-masing pelabuhan perikanan.
- Jasa Konsultansi *Construction Management Consultant* (CMC).

Construction Management Consultant (CMC) bertanggung jawab atas mendampingi tender konstruksi, dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk memastikan penyelesaian tepat waktu sesuai jadwal dan spesifikasi. CMC juga bertugas mendukung PMU dan PIU dalam perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan proyek sesuai prosedur AFD dan peraturan pemerintah, termasuk pengelolaan anggaran, transparansi, serta kepatuhan pada pedoman yang berlaku. Seleksi Jasa Konsultansi CMC Proyek *Eco Fishing Port* dengan HPS senilai Rp. 59,29 Milyar (3,70 Juta Euro) telah dilaksanakan melalui Seleksi *International Competitive Bidding* (ICB) oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa dimulai November 2023, namun pengadaan jasa konsultansi ini dilakukan seleksi ulang karena peserta tender sebelumnya belum ada yang memenuhi persyaratan dan juga pengadaan jasa konsultansi ini berkaitan erat dengan tugas dari konsultan TAO sehingga seleksi ini tidak dapat dilanjutkan karena belum berkontraknya konsultan TAO.

4. **Penyiapan dokumen tender pekerjaan jasa konstruksi untuk lokasi proyek Eco Fishing Port. (25%)**

Penyiapan dokumen Tender pekerjaan konstruksi tidak dapat direalisasikan karena belum berkontraknya TAO pada TA 2024, penyiapan dokumen tender untuk pekerjaan jasa konstruksi merupakan tugas dari konsultan TAO. Penyiapan dokumen tender di estimasikan pada tahun 2025 setelah TAO berkontrak. Sehingga TAO dibantu PMU akan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk tender pekerjaan konstruksi yang diantaranya adalah *Term of Reference* (TOR), *Request For Proposals* (RFP), dan *Letter of Invitation* (LoI).

Sasaran Kegiatan (SK) 4 – Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kepelabuhanan perikanan.

Indikator Kinerja (IK) pada SK 4 ini yaitu tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan pelabuhan perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 17 – Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kepelabuhanan perikanan.

Indikator Indikator ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran, usaha garam, penyuluhan, dan karantina ikan. Tenaga kerja terlibat dalam indikator ini terdiri dari syahbandar, petugas syahbandar, petugas CPIB, dan petugas PIPP.

Tabel 23. Capaian IK “Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kepelabuhanan perikanan”

SS 4	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan (orang)									
IKU 17	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan									
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT		
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	964	422	1328	314,69	-	-	

Pada tahun 2024, Indikator Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kepelabuhanan perikanan telah tercapai 1328 orang dengan persentase capaian 314,69%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Syahbandar di pelabuhan perikanan **(167)**
2. Petugas Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan **(65)**
3. Petugas PIPP **(973)**
4. Petugas CPIB **(123)**

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

Pada tahun 2024, telah terbit 3 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai berikut:

1. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 18 April 2024 tentang Penempatan dan Penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sejumlah 167 Syahbandar.
2. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 21 tahun 2024 tentang Penempatan dan Penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
3. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 21 tahun 2024 tentang Penempatan dan Penugasan Syahbanda di Pelabuhan Perikanan.

Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

Pada tahun 2024, telah dilakukan 2 (dua) kali pelatihan dasar kesyahbandaran bagi Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan Dasar Kesyahbandaran bagi Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari, pada tanggal 26 s.d 31 Agustus 2024, bertempat di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal, Jawa Tengah. Pelatihan ini diikuti oleh 35 (tiga puluh lima) orang peserta yang merupakan ASN yang membidangi pelayanan kesyahbandaran, yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) peserta dari UPT Pusat dan 10 (sepuluh) peserta dari UPT Provinsi.
2. Pelatihan Dasar Kesyahbandaran bagi Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari, pada tanggal 5 s.d 10 Agustus 2024, bertempat

di Vasaka Hotel Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelatihan ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang merupakan ASN yang membidangi pelayanan kesyahbandaran di UPT Pelabuhan Perikanan yang berada di wilayah WPP 715, 717, dan 718.

Petugas PIPP

Petugas PPIP pada tahun 2024 adalah sebanyak 973 orang petugas, yang terdiri dari petugas data pelabuhan perikanan, enumerator PJLP, dan validator PIPP yang aktif dalam penginputan data produksi perikanan tangkap di pelabuhan perikanan ke dalam aplikasi PIPP.

Dalam rangka pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur dan penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pascaproduksi perlu didukung dengan upaya pendataan produksi ikan hasil tangkapan dan harga ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan. Oleh karena itu Direktorat Kepelabuhanan Perikanan telah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis enumerator Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan untuk meningkatkan cakupan pelabuhan perikanan yang melaksanakan pendataan tersebut.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah: (a) terlatihnya para enumerator untuk mengumpulkan data operasional pelabuhan menggunakan aplikasi PIPP; (b) inventarisasi kendala dan permasalahan dalam menjalankan aplikasi PIPP dan upaya pemecahannya; dan (c) Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan komitmen para petugas enumerator terkait dengan pentingnya PIPP dalam rangka mendukung kegiatan penerapan penangkapan ikan terukur dan PNBP pascaproduksi. Selanjutnya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah Petugas PIPP dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pendataan untuk mendukung penerapan penangkapan ikan terukur dan PNBP pascaproduksi.

Peserta Bimtek ini berasal dari Pelabuhan Perikanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang masuk dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2023 tentang Pelabuhan Pangkalan Pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan Yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi dan dan belum aktif melaporkan pendataan dalam PIPP. Adapun Narasumber pada kegiatan Bimtek ini berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Eselon II Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan Bimtek Enumerator PIPP tahun 2024 dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu:

- 1) Tahap 1 diselenggarakan pada hari Senin s.d. Jumat tanggal 26 s.d. 30 Agustus 2024 bertempat di Hotel Santika Premier Jakarta, diikuti oleh 31 (tiga puluh satu) peserta.
- 2) Tahap 2 diselenggarakan pada hari Selasa s.d. Sabtu tanggal 17 s.d. 21 September 2024 bertempat di Hotel Santika Premier Jakarta, diikuti oleh 21 (dua puluh satu) peserta. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dengan *Global Environment Facilities (GEF-6) – World Wildlife Fund (WWF)*.
- 3) Tahap 3 pada hari Selasa s.d. Jum'at tanggal 5 s.d. 8 November 2024 bertempat di Hotel Santika Premier Jakarta, diikuti oleh 71 peserta. Peserta dalam tahap ini juga berasal dari

Pelabuhan Perikanan (UPT) Pusat karena dalam kegiatan ini juga bertujuan untuk : (a) Meningkatkan kualitas dan validitas data dan informasi PIPP; (b) Sinkronisasi data yang dikeluarkan pelabuhan perikanan; (c) Inventarisasi kendala dan permasalahan dalam melaksanakan pendataan dengan aplikasi PIPP dan upaya pemecahannya; (d) Mendapatkan masukan dan saran untuk perbaikan dan pengembangan aplikasi PIPP; dan (e) Mendapatkan masukan dan saran untuk perbaikan dan pengembangan PIPP. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dengan *Outer Ring Fishing Ports Development (Eco Fishing Port) Project by AFD*.

Petugas CPIB

Petugas Pembina CPIB pada tahun 2024 adalah sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) orang petugas, yang tersebar di 48 (empat puluh delapan) pelabuhan perikanan yang terdiri dari 22 Pelabuhan Perikanan UPT Pusat, 22 Pelabuhan Perikanan UPT Daerah, dan 4 Pelabuhan Perikanan Perintis.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka penyiapan dan peningkatan SDM Pembina CPIB di pelabuhan perikanan yaitu:

- 1) Penyiapan SDM pembina CPIB melalui kegiatan pelatihan dan uji kompetensi bagi petugas pembina CPIB di pelabuhan perikanan. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan 2 (dua) kali pelatihan yaitu pada tanggal 07-12 Juli 2024 sebanyak 35 peserta dan pada tanggal 27 Oktober - 01 November 2024 sebanyak 36 peserta.
- 2) Sosialisasi dan rapat koordinasi dengan seluruh pelabuhan perikanan dalam pelaksanaan pembinaan CPIB pasca terbitnya Permen KP Nomor 8 Tahun 2024 dan Permen KP Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- 3) Menyusun modelling pelaksanaan pembinaan CPIB dalam rangka Sertifikasi CPIB bersama BP2MHKP di 3 (tiga) pelabuhan perikanan yaitu PPS Nizam Zachman, PPS Bitung dan PPN Pengambengan (Benoa); dan
- 4) Pelaksanaan Bimbingan Teknis CPIB kepada nelayan di 17 lokasi dengan jumlah total nelayan sebanyak 1.700 orang.

Sasaran Kegiatan (SK) 5 – Tata Kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Kelabuhanan Perikanan.

Indikator Kinerja (IK) pada SK 5 yaitu:

- Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan.
- IP ASN Direktorat Kelabuhanan Perikanan.
- Persentase unit kerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar.
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kelabuhanan Perikanan.
- Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kelabuhanan Perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 18 – Nilai rekonsiliasi Direktorat Kelabuhanan Perikanan

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rekonsiliasi Kinerja merupakan salah satu metode evaluasi implementasi SAKIP untuk penilaian cepat terhadap pengelolaan kinerja sebuah unit kerja. Rekonsiliasi kinerja didasarkan 4 (empat) aspek, yaitu aspek kepatuhan (bobot 25%), aspek kesesuaian (bobot 25%), aspek ketercapaian (bobot 30%), dan aspek ketetapan (bobot 25%)

Tabel 24. Capaian IK “Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan”

SK 5		Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kelabuhanan Perikanan							
IK 18		Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan (Nilai)							
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	99,21	94	97,80	104,04	-	-

Kegiatan rekonsiliasi kinerja dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024. Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan pada tahun 2024 sebesar 97,80 dari target 94 atau 104,04 dari target tahun 2024. Rekapitulasi Lembar Kerja Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 25.Rekapitulasi Lembar Kerja Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2024.

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per Aspek	100	100	111,19	100
Skor x Bobot	25	25	27,80	20
Total Skor	97,80			

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, capaian Indikator ini menunjukkan penurunan 1,41%. Hal ini dipengaruhi oleh aspek ketercapaian yang sedikit menurun pada tahun 2024, yang secara umum bersumber dari capaian IKU dan IK pada triwulan I s.d Triwulan IV tahun 2024.

Indikator Kinerja (IK) 19 – IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Indikator Kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN. Hasil pengukuran ini dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalitas ASN mencakup empat dimensi utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dimensi kualifikasi menggambarkan tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh ASN, mulai dari jenjang tertinggi hingga terendah. Dimensi kompetensi mencakup riwayat pengembangan kompetensi pegawai, seperti pelaksanaan diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, serta seminar, workshop, magang, atau kursus yang relevan dengan tugas jabatan. Dimensi kinerja mengukur pencapaian individu berdasarkan rencana kinerja pada tingkat individu dan organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang diperoleh. Penilaian kinerja ini mengacu pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Sementara itu, dimensi disiplin menggambarkan rekam jejak pegawai terkait hukuman disiplin yang pernah diterima, dengan data diambil dari portal KKP.

Tantangan utama dalam pencapaian indikator ini salah satunya adalah pemutakhiran data pada portal KKP, di mana masih banyak data yang belum diperbarui secara berkala oleh pengelola aplikasi. Selain itu, tantangan lain terdapat pada dimensi kompetensi, di mana sejumlah pejabat struktural belum mengikuti diklatpim sesuai levelnya maupun diklat teknis

lainnya. Namun, untuk staf, pelatihan 20 JP telah tercapai berkat partisipasi mereka yang rutin dalam berbagai bimtek dan pelatihan baik secara luring maupun daring.

Sebagai langkah antisipasi, berbagai upaya telah dilakukan, antara lain melakukan pembaruan data secara berkala, melaksanakan koordinasi, serta memberikan bimbingan teknis (bimtek) untuk memperbarui data pada portal KKP. Selain itu, dari sisi pengembangan kompetensi, koordinasi intensif dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP terus dilakukan untuk merencanakan pelatihan bagi pegawai KKP, termasuk penyelenggaraan diklat, pelatihan, dan pendidikan bagi ASN.

Tabel 26. Capaian IK "IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

SK 5 Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan									
IK 19 IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan									
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra
-	-	83,03	-	88,12	84	91,57	109,01	76	120,45

Pada tahun 2024, IK IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan telah tercapai 91,57 (Sangat Tinggi) dari target 84, dengan persentase realisasi terhadap target sebesar 109,01%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, ada kenaikan 3,45%. Hal ini tentunya tidak lepas dari kerjasama yang baik dari seluruh ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dalam partisipasinya melaporkan sertifikat pelatihan maupun seminar sepanjang tahun 2024.

- Ropeg Warehouse

x

+

←

→

↺

⚠ Not secure

ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024/unker/250

🔍

☆

📄

🖼

⋮



IP ASN 2024

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

IP ASN 2023

Silakan ketik Nama Unit Kerja.

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN TANGKAP	91	21.34	85.36 %	30.47	76.17 %	25.93	86.43 %	5	100 %	82.74	TINGGI
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN	51	21.39	85.56 %	28.69	71.73 %	26.08	86.93 %	5	100 %	81.16	TINGGI
3	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	56	21.68	86.72 %	38.12	95.3 %	27.32	91.07 %	5	100 %	92.12	SANGAT TINGGI
4	DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN	57	21.68	86.72 %	38.89	97.23 %	25.96	86.53 %	5	100 %	91.54	SANGAT TINGGI
5	DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	57	21.63	86.52 %	36.76	91.9 %	26.32	87.73 %	5	100 %	89.71	TINGGI

Gambar 4. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dan Direktorat lain di DJPT Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan capaian IP ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (81,76), capain IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan lebih tinggi dengan persentase 92,12.

Indikator Kinerja (IK) 20 – Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penilaian Capaian IKU MP dengan menggunakan *platform* Portal *Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>)

Tabel 27. Capaian IK Persentase unit kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

SK 5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan								
IK 20	Persentase unit kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)								
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra
-	-	100	-	133,33	94	133,33	141,84	90	148,14

Pada tahun 2024, Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar telah tercapai 133,33% dari target 94%, dengan persentase realisasi terhadap target sebesar 120%. Hal ini sesuai dengan Memorandum Plt. Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap, Nomor 1460/DJPT.1/TU.140/I/2025, tanggal 14 Januari 2025, hal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar KKP Triwulan IV Tahun 2024 lingkup DJPT, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 28. Capaian IK Manajemen Pengetahuan Terstandar Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2024

No.	Nama Eselon II	Nilai Target	Nilai Capaian TW IV (100%)	Nilai Capaian TW I - TW IV (100%)*
1	Sekretariat	94	133,33	133,33
2	Dit.PSDI	94	133,33	133,33
3	Dit. KAPI	94	133,33	133,33
4	Dit.KP	94	133,33	133,33
5	Dit.PDK	94	133,33	133,33
DJPT		94,00	133.33	133.33

Jika dibandingkan dengan capaian IK ini pada Direktorat lain lingkup KKP, persentase capaian menunjukkan capaian yang sama dengan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 21 – Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Indikator ini menunjukkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan kepada Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berdasarkan LHP yang terbit pada bulan triwulan IV 2023 s.d triwulan III Tahun 2024 yang dokumennya telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah tuntas) oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Tabel 29. Capaian IK “Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

SS 5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan									
IKU 21	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)									
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT		
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra	
-	-	100	-	100	80	100	125	80	125	

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada tahun 2024 yaitu 100% atau 125% dari target yang ditentukan. Rekapitulasi laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 30. Laporan hasil pengawasan Itjen KKP lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

No	Nomor LHP	Laporan Hasil Pengawasan	Sebelum Tindak Lanjut			Tindak Lanjut			Ket
			Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	
1	R.296/ITJ.2/HP.130/XI/2023	Probit Audit atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Ukurlaran SKPT Saumlaki Provinsi Maluku	3	5		3	5		TUNTAS
2	R.323/ITJ.2/HP.130/XII/2023	Probit Audit Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana SKPT Morotai, Provinsi Maluku Utara	2	8		2	8		TUNTAS
3	R.3/ITJ.2/HP.380/I/2024	Hasil Reviu Dokumen Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pekerjaan Pengawasan Proteksi Tiang Pancang Dermaga Tambahan PPI Fandoi Kabupaten Biak Numfor.	1	4		1	4		TUNTAS
4	R.62/ITJ.2/HP.380/III/2024	Hasil Reviu Permohonan Pembayaran Termin Keenam (Tahap Pendampingan Tender) Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa -	1	4		1	4		TUNTAS
5	120/ITJ.2/HP.470/V/2024	Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Ukurlaran Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki, Provinsi Maluku	2	3		2	3		TUNTAS
6	190/ITJ.2/HP.470/VI/2024	Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu	3	4		3	4		TUNTAS
7	R.241/ITJ/HP.470/IX/2024	Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Tiakur Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Provinsi Maluku	3	3		3	3		TUNTAS

Sesuai dengan tabel diatas, terdapat 7 (tujuh) kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Berdasarkan rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan, terdapat 15 (lima belas) temuan dan 31 (tiga puluh satu) saran yang seluruhnya telah ditindaklanjuti, sehingga tidak terdapat sisa temuan dan/atau saran yang perlu ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja (IK) 22 – Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp111.585.729.000. sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan nomor DIPA: SP-DIPA 032.03.1.238720/2024 tanggal 28 November 2023. Anggaran tersebut dengan kegiatan utama Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan. Capaian pelaksanaan anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp 82.953.466.183 atau sebesar 74,34% dari total pagu anggaran 2024.

Tabel 31. Capaian IK “Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan”

SK 5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan									
IK 22	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)									
Realisasi 2019-2023					Realisasi 2024			Renstra DJPT		
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi thd Target Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	84,74	98	74,39	75,86	-	-	

Capaian penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dapat dijelaskan melalui beberapa sumber pendanaan yang terdiri dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN). Berikut adalah capaian realisasi masing-masing sumber anggaran dan evaluasinya:

1. Realisasi Anggaran dari Rupiah Murni (RM)

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berhasil merealisasikan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan tingkat capaian sebesar 99,65%. Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang hampir sempurna dari segi penyerapan, di mana seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Capaian ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan dana yang dialokasikan dari sumber anggaran ini.

2. Realisasi Anggaran dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sumber anggaran yang berasal dari PNBP mencapai tingkat realisasi sebesar 87,42%, yang disebabkan oleh tidak tercapainya target PNBP Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian anggaran yang bergantung pada hasil PNBP perlu ditingkatkan melalui optimalisasi penerimaan dan pengelolaan pendapatan. Selain itu, fluktuasi pendapatan dari PNBP menjadi salah satu tantangan dalam memastikan realisasi anggaran secara penuh, sehingga memerlukan perencanaan yang lebih realistis berdasarkan analisis proyeksi pendapatan.

3. Realisasi Anggaran dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN)

Tingkat realisasi anggaran dari PHLN hanya mencapai 41,25%, yang disebabkan oleh kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk jasa konsultansi Project Management Consultant (PMC) dan Construction Management Consultant (CMC). Proses seleksi penyedia membutuhkan waktu yang lebih lama dari perkiraan, sehingga memengaruhi penyerapan anggaran. Namun, penting untuk dipahami bahwa anggaran yang bersumber dari PHLN merupakan akumulasi dana selama periode 6 tahun, dan tidak diwajibkan untuk direalisasikan secara penuh setiap tahun.

Pengelolaan anggaran PHLN bersifat fleksibel dan mempertimbangkan dinamika kebutuhan pembangunan serta pengembangan pelabuhan perikanan. Hal ini juga memperhatikan perubahan prioritas nasional dan kebijakan pemerintah yang dapat berdampak pada pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, alokasi anggaran PHLN dirancang untuk mendukung program jangka panjang yang terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak hanya berfokus pada penyerapan tahunan, tetapi juga pada pencapaian outcome strategis dalam pembangunan pelabuhan perikanan.

Strategi dan Rencana Perbaikan ke Depan

Untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran di masa mendatang, beberapa langkah strategis telah dirancang sebagai upaya perbaikan, yaitu:

1. Menyusun Timeline Serapan Anggaran/Rencana Penarikan Dana (RPD)

Salah satu langkah penting yang akan dilakukan adalah penyusunan timeline serapan anggaran atau Rencana Penarikan Dana (RPD) dari masing-masing Tim Kerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Dengan adanya RPD yang terstruktur dan terjadwal, proses penyerapan anggaran dapat dikelola lebih baik, sehingga meminimalkan risiko keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

2. Melakukan Rekonsiliasi Keuangan secara Berkala

Rekonsiliasi keuangan secara berkala antara Tim Kerja Dukungan Manajerial dan Tim Kerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan akan dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian data keuangan dan penggunaan anggaran. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi laporan keuangan serta mendukung pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

3. Memberikan Asistensi Khusus kepada Tim Kerja P4LN

Asistensi khusus akan diberikan kepada Tim Kerja Pengelola Pinjaman Luar Negeri (P4LN) guna mendukung pengelolaan anggaran PHLN secara lebih optimal. Langkah ini mencakup pembinaan teknis terkait pengelolaan anggaran, perencanaan kegiatan, serta percepatan proses PBJ untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanaan program.

4. Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Untuk mengantisipasi kendala dalam proses PBJ, terutama terkait jasa konsultasi PMC dan CMC, Direktorat akan melakukan penguatan sistem perencanaan PBJ dengan melibatkan seluruh pihak terkait sejak tahap awal. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses seleksi penyedia dan memastikan waktu pelaksanaan yang sesuai dengan target.

5. Mengintegrasikan Perencanaan dengan Dinamika Kebutuhan dan Kebijakan Nasional

Pengelolaan anggaran PHLN akan terus diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan, termasuk mempertimbangkan dinamika kebijakan

nasional yang dapat memengaruhi prioritas kegiatan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran PHLN dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta menghasilkan manfaat strategis bagi sektor perikanan tangkap.

Capaian indikator kinerja persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam realisasi anggaran Rupiah Murni dengan capaian hampir maksimal (99,65%), meskipun terdapat kendala pada sumber anggaran PNPB dan PHLN. Tantangan utama yang dihadapi, seperti fluktuasi pendapatan PNPB dan proses PBJ untuk anggaran PHLN, menjadi fokus perbaikan ke depan.

Dengan menyusun langkah-langkah strategis, seperti penyusunan timeline RPD, rekonsiliasi keuangan, asistensi khusus untuk P4LN, serta penguatan perencanaan PBJ, diharapkan penyerapan anggaran dapat lebih optimal di masa mendatang. Selain itu, pemahaman bahwa anggaran PHLN bersifat akumulatif selama 6 tahun memberikan fleksibilitas dalam perencanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan dinamika kebutuhan pembangunan pelabuhan perikanan dan kebijakan nasional yang berlaku. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di masa depan.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 118.869.120.000, sesuai dengan DIPA Direktorat Kepelabuhanan Perikanan TA. 2024 dengan nomor DIPA: SP-DIPA 032.03.1.238720/2024 tanggal 24 November 2023, untuk kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan. Sampai dengan akhir tahun 2024, anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan mengalami revisi dan ditetapkan sebesar Rp.111.585.729.000. Capaian pelaksanaan anggaran tahun 2024 adalah sebesar sebesar Rp 82.953.466.183 atau sebesar 74,34% dari total pagu anggaran 2024. Penyerapan anggaran berdasarkan sasaran kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 32. Penyerapan anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Target Anggaran Th. 2024	Realisasi Anggaran Th. 2024	NPSS	% Realisasi Anggaran
1.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	15.992.692.000	15.208.804.945	111,72	95%
2.	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing	8.766.800.000	8.436.933.740	112,44	96%

3.	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP Perikanan tangkap yang optimal	85.923.124.000	58.405.491.851	95,65	68%
4.	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kepelabuhanan perikanan	-	-	120	-
5.	Tata kelola pemerintah yang baik dilingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	-	-	105,78	-

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2024 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama pelaksanaan tahun anggaran 2024. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja sepanjang tahun, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target dan sasaran yang telah ditetapkan berhasil tercapai, namun dari 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja yang ditetapkan, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang realisasinya tidak memenuhi target, yaitu:

1. Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf Internasional yang Dibiayai Melalui Pinjaman Luar Negeri;
2. Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Eco Fishing Port yang Dibiayai Melalui Pinjaman Luar Negeri;
3. Indikator Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Dengan memperhatikan pencapaian terhadap Indikator Kinerja pada tahun 2024, Direktorat Kepelabuhanan akan fokus pada perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kinerja untuk menghasilkan hasil yang lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.

4.2. Tindak Lanjut Periode Sebelumnya

- Melaksanakan Kegiatan Bimtek Enumerator PIPP tahun 2024 dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu:
 - 1) Tahap 1 diselenggarakan pada hari Senin s.d. Jumat tanggal 26 s.d. 30 Agustus 2024 bertempat di Hotel Santika Premier Jakarta, diikuti oleh 31 (tiga puluh satu) peserta.
 - 2) Tahap 2 diselenggarakan pada hari Selasa s.d. Sabtu tanggal 17 s.d. 21 September 2024 bertempat di Hotel Santika Premier Jakarta, diikuti oleh 21 (dua puluh satu) peserta. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dengan *Global Environment Facilities (GEF-6) – World Wildlife Fund (WWF)*.
 - 3) Tahap 3 pada hari Selasa s.d. Jum'at tanggal 5 s.d. 8 November 2024 bertempat di Hotel Santika Premier Jakarta, diikuti oleh 71 peserta. Peserta dalam tahap ini juga berasal dari Pelabuhan Perikanan (UPT) Pusat karena dalam kegiatan ini juga bertujuan untuk : (a) Meningkatkan kualitas dan validitas data dan informasi PIPP; (b) Sinkronisasi data yang dikeluarkan pelabuhan perikanan; (c) Inventarisasi kendala dan permasalahan dalam melaksanakan pendataan dengan aplikasi PIPP dan upaya pemecahannya; (d) Mendapatkan masukan dan saran untuk perbaikan

dan pengembangan aplikasi PIPP; dan (e) Mendapatkan masukan dan saran untuk perbaikan dan pengembangan PIPP. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dengan *Outer Ring Fishing Ports Development (Eco Fishing Port) Project by AFD*.

- Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan pembahasan program mutu pada Konsultan PMC dan CMC pada tanggal 12-13 Desember 2024 di Aloft Hotel Jakarta
- Telah dilaksanakan Kegiatan *Eco Fishing Port Project Outlook and Yearly Evaluation Meeting 2024* pada tanggal 3-6 Desember 2024 di Yogyakarta

4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2024, rekomendasi yang disarankan untuk peningkatan kinerja untuk mencapai target tahun 2024 sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis peningkatan keahlian bagi pengelola Pelabuhan perikanan.
- Peningkatan kapasitas SDM Kesyahbandaran melalui pelaksanaan Diklat Syahbandar dan Pelatihan Dasar Kesyahbandaran bagi Petugas kesyahbandaran.
- Peningkatan Kompetensi Syahbandar melalui pelaksanaan pelatihan sertifikasi berupa radio, pemadam kebakaran, pencarian dan penyelamatan dan kompetensi lainnya.
- Percepatan reviu Peraturan Menteri KP No. 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
- Penyusunan MOU antara Ditjen Perikanan Tangkap dengan Ditjen Perhubungan laut terkait dengan pelaksanaan PSMA.
- Peningkatan pemahaman dan kompetensi OKL beserta petugas penerbitan SHTI.
- Evaluasi pelabuhan pangkalan bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk menentukan pelabuhan pangkalan yang akan ditetapkan menjadi pelabuhan pangkalan PIT dan PNBK Pasca Produksi pada tahun 2025.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Tri Aris Wibowo**

Jabatan : Direktur Kepelabuhanan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

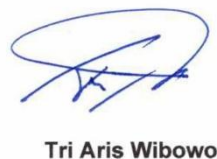
Jakarta, 21 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,

PIHAK PERTAMA
Direktur Kepelabuhanan Perikanan,



Lotharia Latif



Tri Aris Wibowo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KEPELABUHAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	1	Persentase Pelabuhan Perikanan yang Dikembangkan dan ditingkatkan Fasilitasnya (Persen)	6
		2	Persentase Pembangunan SKPT (Persen)	85
2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing	3	Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	35
		4	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	2
		5	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	28
		6	Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	48
		7	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	15
		8	Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	40
		9	Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	78
		10	Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	77
		11	Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	78
3	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBП perikanan tangkap yang optimal	12	Pelabuhan Pangkalan Yang Menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (Pelabuhan)	296
		13	Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBП Pascaproduksi (Pelabuhan)	90
		14	Tingkat penerapan PNBП Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai/Skala)	89
		15	Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		16 Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port yang dibiayai Melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	100
4	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan	17 Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan KP (Orang)	422
5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	18 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	94
		19 IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	84
		20 Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Persen)	94
		21 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	80
		22 Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	98

Data Anggaran:

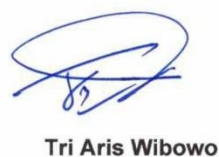
No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	118.869.120.000
Total Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan		118.869.120.000

Jakarta, 21 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

PIHAK PERTAMA
Direktur Kepelabuhanan Perikanan


Lotharia Latif


Tri Aris Wibowo

RENCANA AKSI
DIREKTORAT KEPELABUHAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	UNIT PJ	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PAGU REVISI	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TARGET KEGIATAN BERKALA											
								Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	1.	P4LN Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dilakukan pengendalian pembangunan/ pengembangan fasilitasnya	2.900.000.000	1.347.000.000	7	Laporan				1		2			2			2
			AKP4 Pelaksanaan pembangunan/pengembangan prasarana pelabuhan perikanan untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	10.000.000.000	625.000.000	25	Unit												25
			P3 Pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di UPT Pusat untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	20.000.000.000	2.261.390.000	31	Unit												31
		2	P3 Pembinaan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Hibah Pemerintah Jepang	758.551.000	758.551.000														
		3	AKP4 Pengelola pelabuhan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan	700.000.000	700.000.000	1	Laporan												1
			P3 Pengelola Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Bidang Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan	700.000.000	700.000.000	1	Laporan												1
			AKP4 Pelabuhan perikanan yang diidentifikasi rencana pembangunan/pengembangan fasilitasnya	2.400.000.000	1.374.000.000	7	Dokumen												7
		4	PHLN Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terluar dan/atau berwawasan lingkungan	30.100.000.000	24.754.150.000	4	Unit												4
		5	TOPP Pelabuhan perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar	2.000.000.000	1.100.000.000	74	Lembaga												74
			P3 Tata kelola dan operasional Pelabuhan Perikanan di lokasi SKPT	5.000.000.000	2.251.739.000	12	Lembaga												12
			TOPP Petugas mutu di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	500.000.000	287.000.000	100	Orang												100
		6	TOPP Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	38.604.744.000		31	Lembaga												31
			TOPP Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Pengusahaan di Pelabuhan Perikanan	838.220.000	100.000.000	37	Lembaga												37

[illegible]

